

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN ALOKASI DANA BANK

(Studi Kasus Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

BULKIEZ ZULMIA
0610320036



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2010**

RINGKASAN

Bulkiez Zulmia, 2010, **Analisis Efektivitas Penyaluran Kredit Dalam Rangka Mengoptimalkan Alokasi Dana Bank** (Studi Kasus pada PT. Bank Jatim Cabang Malang), Drs. Nengah Sudjana, M.Si, Drs. Dwi Atmanto, M.Si, 111 Hal + xix

Perkembangan perekonomian saat ini banyak ditunjang oleh perbankan terutama untuk pendanaan usaha. Maka dari itu perkembangan dan perbaikan mutu perbankan mutlak untuk dilakukan, sebab kinerja perbankan mempengaruhi kestabilan perekonomian negara.

Usaha perbaikan perbankan salah satunya adalah menjaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. upaya bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah dengan menjaga kestabilan likuiditas yang merupakan prioritas utama bank yaitu penarikan dana sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menempatkan dana bank ke dalam cadangan yang telah ditetapkan oleh BI.

Perbaikan perbankan lainnya adalah dengan meningkatkan jumlah kredit, sebab kredit merupakan tulang punggung perbankan. Namun peningkatan jumlah kredit merupakan hal yang bertolak belakang dengan likuiditas, karena semakin banyak dana yang dikucurkan maka akan semakin berkurang tingkat likuiditas bank. Oleh sebab itu, dalam mengoptimalkan alokasi dana bank melalui penyaluran kredit, bank harus memperhatikan batasan LDR yang telah ditetapkan BI sebesar 80%-110%. Sedangkan batas LDR bank dengan predikat sehat yaitu $90% < LDR < 94,75%$, yang artinya minimum LDR adalah 90% dan maksimum LDR adalah 94,75%.

Kredit merupakan usaha bank yang mengandung resiko yaitu kredit macet, oleh karena itu harus didukung oleh sistem dan pengawasan kredit yang benar, sebab kegagalan pemberian kredit merupakan salah satu penyebab utama kehancuran bank. Tingkat kegagalan kredit ini dapat diukur dengan rasio NPL, yang batasannya telah ditetapkan maksimal sebesar 5%.

Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Jatim Cabang Malang, menunjukkan tingkat LDR dari tahun 2006-2008 tertinggi hanya mencapai 81%, yaitu masih berada jauh di bawah batas LDR bank yang dinyatakan sehat. Bank Jatim Cabang Malang dilihat dari tingkat LDR-nya dikatakan sangat likuid, namun disisi lain juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Bank Jatim memiliki jumlah dana tidak produktif yang cukup banyak, dengan kata lain efektivitas penyaluran kredit belum sepenuhnya tercapai, dan optimalisasi alokasi dana terutama untuk kredit belum secara optimal dilakukan oleh Bank Jatim. Apabila dilihat dari nilai NPL, efektivitas penyaluran kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang telah tercapai, di mana nilai NPL-nya dari 2006-2008 di bawah 0,5%. Namun demikian nilai NPL dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan jumlah penyaluran kredit yang semakin meningkat diikuti pula oleh peningkatan jumlah kredit bermasalah. Adanya kecenderungan tersebut perlu diwaspadai dan perlu dilakukan evaluasi dari segi jenis kreditnya dan sistem pemberian serta pengawasan kredit yang ada pada bank Jatim Cabang Malang, sehingga hal tersebut tidak terus berkepanjangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Kredit dalam Rangka Mengoptimalkan Alokasi Dana Bank” (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Malang). Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penyelesaian skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sumartono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Kusdi Raharjo, DEA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Drs. Nengah Sudjana, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan juga motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Dwi Atmanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan juga motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.

7. Bpk. Bambang Ismariady, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Jatim Cabang Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang dipimpin.
8. Bpk. Suhartono, selaku Penyelia Umum/SDM, Bpk. Mulyawan, selaku Penyelia Akuntansi, Bpk. Muhammad Fahmi, selaku Penyelia Pemasaran dan KKP beserta seluruh staf, terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.
9. Ayah, Mama, Mbak Sindha dan Mirza yang tercinta, terima kasih atas dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Arfinda Puput Rahmada yang terkasih. Terima kasih atas doa, dukungan dan kesabarannya selama ini.
11. Sahabat-sahabat terkasih, Ayu, Dally, Nana'. Makasih buat semua bantuan kalian ya....
12. Semua teman-teman kelas B, yang telah banyak membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Administrasi Bisnis dan MK '06.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar atas kebaikan yang telah diberikan pada penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
F. Kerangka Pemikiran	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Teori Perbankan	12
1. Pengertian Bank	12
2. Fungsi Bank	13
3. Jenis Bank	14
4. Sumber Dana Bank	15
5. Alokasi Dana Bank	18
6. Likuiditas Bank	21
B. Kredit	22
1. Pengertian Kredit	22
2. Unsur-unsur Kredit	23
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	24
4. Jenis-jenis Kredit	26
5. Kebijakan Kredit	28
6. Prinsip Penilaian Kredit	29
7. Prosedur Umum Kredit	32
8. Kolektibilitas Kredit	34
9. Pengawasan Kredit	35
C. Efektifitas Penyaluran Kredit	40
1. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	40
2. <i>Non Performing Loans</i> (NPL)	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	45

G. Analisa Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Perusahaan	49
1. Sejarah Singkat PT. Bank Jatim	50
2. Lokasi PT. Bank Jatim Cabang Malang	50
3. Motto dan Slogan PT. Bank Jatim Cabang Malang	50
4. Visi dan Misi PT. Bank Jatim Cabang Malang	51
B. Sumber Dana	51
1. Sumber Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang	51
2. Analisis Sumber Dana	55
C. Alokasi Dana	59
1. Alokasi Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang	59
2. Analisis Alokasi Dana	61
D. Kredit	62
1. Kebijakan Kredit	62
2. Jenis Kredit	64
3. Analisis Jenis Kredit	73
4. Sistem Pemberian Kredit	75
5. Analisis Sistem Pemberian Kredit	94
6. Pengawasan Kredit Bermasalah	98
7. Analisis Pengawasan Kredit Bermasalah	101
E. Efektifitas Penyaluran Kredit	101
1. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	101
2. <i>Non Performing Loans</i> (NPL)	102
3. Analisis Efektifitas Penyaluran Kredit	105
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Indikator Kinerja Bank Umum	2
2.	Data Total Kredit, DPK Dan Penanaman Dana Dalam SBI Pada Laporan Triwulan Neraca PT. Bank Jatim Tahun 2004-2008	4
3.	Pengendalian Manajemen Dalam Proses Kredit	30
4.	Tingkat Kesehatan Bank Dari Segi LDR	41
5.	Komposisi Sumber Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang	55
6.	Komposisi Alokasi Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang	61
7.	Kredit Modal Kerja PT. Bank Jatim Cabang Malang	68
8.	Kredit Investasi PT. Bank Jatim Cabang Malang	70
9.	Kredit Konsumsi PT. Bank Jatim Cabang Malang	72
10.	Perhitungan <i>Loan To Deposit Ratio</i>	102
11.	Perhitungan <i>Non Performing Loan</i>	103
12.	Rincian Tingkat Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Jenis Penggunaan Gabungan – Cabang Malang	104
13.	Perkembangan <i>Loan To Deposit Ratio</i>	106

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal.
1.	Grafik Pertumbuhan Kredit, DPK Dan SBI Pada Bank Umum	3
2.	Diagram <i>Pool Of Fund Approach</i>	20
3.	Diagram <i>Assets Allocation Approach</i>	20
4.	Grafik Komposisi DPK PT. Bank Jatim Cabang Malang	56
5.	Grafik Pertumbuhan Tabungan PT. Bank Jati Cabang Malang	57
6.	Grafik Pertumbuhan Giro PT. Bank Jatim Cabang Malang	58
7.	Grafik Pertumbuhan Deposito PT. Bank Jatim Cabang Malang	59
8.	Grafik Penyaluran Kredit Berdasar Jenis Penggunaan- PT. Bank Jatim Cabang Malang	67
9.	Proses Pengajuan Permohonan Kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang	76
10.	Sistem Pemberian Kredit Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang	85
11.	Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Malang	87
12.	Sistem Pemberian Kredit Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang (Yang Disarankan)	99

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Neraca PT. Bank Jatim Cabang Malang Tahun 2006-2008	-



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Rmainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, keuangan dan usaha-usaha lainnya. Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apa pun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun.

Lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana salah satunya yaitu bank. Definisi bank menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi Bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan dari masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal sendiri dari pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, pemenuhan modal yang memadai, serta pengalokasian dana yang optimal baik melalui penyaluran kredit maupun alokasi

lain yang menghasilkan sehingga dana yang tidak produktif dapat ditekan serendah mungkin.

Peranan Bank sebagai Lembaga Keuangan selalu berkaitan dengan penyaluran kredit, dimana Bank mengandalkan pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan utama untuk menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maka, upaya memperkuat ketahanan sistem perbankan salah satunya yaitu melalui penyaluran kredit. Di mana daya tahan bank umum tercermin dari terjaganya indikator kinerja seperti yang terlihat pada tabel 1. Ekspansi kredit yang semakin meningkat terbukti kondusif dalam pembiayaan perekonomian domestik. Kualitas kredit tetap terpelihara baik, sebagaimana tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2008, baik *gross* maupun *net*, yang berhasil mencatat angka terendah semenjak krisis keuangan asia tahun 1997/1998 dan sekaligus berada jauh di bawah target indikatif yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tabel 1
Indikator Kinerja Bank Umum

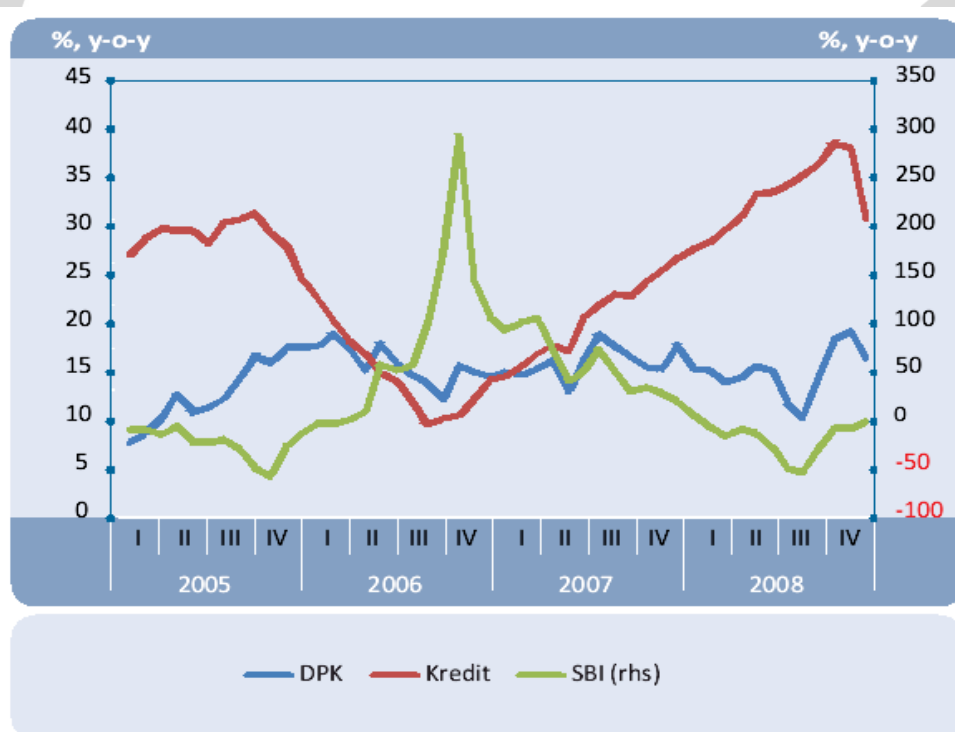
Indikator Utama	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total Aset (triliun Rp)	1.030,5	1.099,7	1.112,2	1.196,2	1.272,3	1.469,8	1.693,5	1.986,5	2.310,6
DPK (triliun Rp)	699,1	797,4	835,8	888,6	963,1	1.127,9	1.287,0	1.510,7	1.753,3
Kredit (triliun Rp) ¹	320,5	358,6	410,3	477,2	595,1	730,2	832,9	1.045,7	1.353,6
LDR (Kredit/DPK %)	45,8	45,0	49,1	53,7	61,8	64,7	64,7	69,2	77,2
NII (triliun Rp) ²	1,9	3,2	3,6	4,1	5,5	5,9	6,9	8,0	9,4
ROA (%)	0,9	1,4	1,9	2,5	3,5	2,6	2,6	2,8	2,3
NPL gross (%)	18,8	12,1	8,1	8,2	5,8	8,3	7,0	4,6	3,8
NPL net (%)	5,8	3,6	2,1	3,0	1,7	4,8	3,6	1,9	1,5
CAR (%)	12,7	20,5	22,5	19,4	19,4	19,5	20,5	19,2	16,2

1) Termasuk kredit penerusan (*channelling*) 2) NII rata-rata perbulan

Sumber: www.bi.go.id

Kredit merupakan kegiatan utama bank, di mana kredit mampu mendukung aktifitas perekonomian domestik yang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Dari tabel 1 diketahui bahwa ekspansi kredit tahun 2008 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. Pertumbuhan kredit yang tinggi ternyata disertai oleh pertumbuhan DPK yang lebih rendah, sehingga menimbulkan risiko likuiditas di beberapa bank, meskipun secara umum sistem likuiditas tetap terjaga. Kecepatan pertumbuhan kredit sebesar Rp308,0 triliun hanya diimbangi dengan laju peningkatan DPK sebesar Rp242,6 triliun. untuk memenuhi komitmen kreditnya, perbankan mencairkan SBI yang dimilikinya, sehingga komposisi SBI dalam aktiva produktif bank menurun (Gambar 1). Kondisi ini membuat likuiditas perbankan berkurang.

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Kredit, DPK, dan SBI pada Bank Umum



Sumber: www.bi.go.id

Sama halnya jika dilihat dari sisi naraca bank, dapat diketahui bahwa di sisi aktiva yang menggambarkan pola pengalokasian dana bank didominasi oleh penggunaan dana untuk kredit. Hal ini terlihat dari tabel laporan triwulan PT.

Bank Jatim pada Bank Indonesia yang menggambarkan bahwa dari total *asset* sebesar 8,7 triliun pada 2004, dana yang dikeluarkan untuk kredit mendominasi sebesar 43% daripada penanaman dana dalam bentuk SBI sebesar 11%, yang notabennya merupakan bentuk surat berharga yang paling disenangi oleh bank. Serta pada tahun 2008, dari total *asset* sebesar 16,3 triliun pengeluaran kredit mendominasi sebesar 46% daripada dana dalam SBI yang hanya sebesar 24%.

Tabel 2
Data Total Kredit, DPK dan Penanaman Dana Dalam SBI
Pada Laporan Triwulan Neraca PT Bank Jatim
Tahun 2004 – 2008
(In triliun)

	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Total Assets	8,68		10,70		14,12		15,74		16,29	
DPK	6,99		9,07		11,97		13,16		13,74	
Loans	3,68	43%	4,09	38%	4,64	33%	5,54	35%	7,42	46%
SBI	0,93	11%	2,16	20%	4,47	32%	3,99	25%	3,89	24%

Sumber: www.bi.go.id, diolah

Peranan bank dalam memberikan kredit selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga yang terjadi pada PT. Bank Jatim, tetapi pertumbuhan kredit tidak disertai dengan peningkatan DPK. Terlihat dari tabel 2, bahwa pertumbuhan kredit dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 1,88 triliun hanya diimbangi peningkatan DPK sebesar 0,58 triliun. Dari data tersebut dapat kita lihat, volume kredit yang terus mengalami peningkatan haruslah diimbangi dengan peningkatan penghimpunan dana. Karena apabila kondisi seperti itu terus berjalan, likuiditas bank untuk kedepannya akan terancam.

PT. Bank Jatim Cabang Malang, merupakan Bank Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai bank umum pemerintah daerah, PT. Bank Jatim cabang malang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *agent of development* dan *comercial bank*. PT. Bank Jatim Cabang Malang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah, dunia

usaha serta perorangan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang adalah dengan menyediakan sumber dana bagi masyarakat melalui berbagai produk kredit yang ada.

Peningkatan pemberian kredit merupakan hal yang bertolak belakang dengan likuiditas bank, oleh karena itu peningkatan pemberian kredit harus memperhatikan batasan likuiditas dimana salah satunya diukur menggunakan analisa LDR (*Loan to Deposits Ratio*). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan, dan apabila tingkat LDR terlalu rendah hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa banyak dana yang tidak produktif. Maka dari itu harus dilakukan pengoptimalan alokasi dana bank sehingga pemberian dana untuk kredit tetap maksimal tetapi kondisi likuiditas tetap terjaga, serta tidak terlalu banyak dana yang tidak produktif. Optimalisasi alokasi dana bank dapat terlihat dari bagaimana bank tersebut menempatkan dananya untuk cadangan dan kredit.

Kredit merupakan kegiatan utama bank yang memberikan *return* yang besar, tetapi kredit merupakan penggunaan dana bank yang mengandung resiko yang tinggi yaitu resiko kredit macet. Selain itu, kredit memiliki tingkat likuiditas yang rendah dibandingkan penggunaan dana untuk pembelian sekuritas. Agar efektivitas penyaluran kredit dapat tercapai, maka harus didukung dengan sistem pemberian kredit yang memenuhi tujuan dari pengendalian intern yaitu mencegah praktik yang tidak sehat dalam hal-hal yang dapat merugikan bank.

Tunggakan kredit dapat disebabkan oleh petugas bank yang kurang cermat dalam menganalisis permohonan kredit, juga kemungkinan terjadinya kolusi antara pihak analis kredit dengan debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif, selain itu disebabkan oleh kondisi keuangan nasabah yang bersangkutan yaitu karena nasabah tersebut mengalami penurunan kondisi keuangan, terjadinya bencana alam yang tidak terduga menimpa usaha nasabah ataupun adanya itikad yang kurang baik dari nasabah dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar kredit tersebut. Menurut Kasmir (2006:104) dalam menyalurkan kredit, bank melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang ada

pada debitur, yaitu faktor 5C yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Conditional* (kondisi) dan *Collateral* (jaminan). Selain juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai, meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek amdal. Walaupun demikian terkadang bank juga melakukan ketidaktelitian dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan beberapa kendala, seperti tunggakan kredit. *Prudential principle* (prinsip ketelitian dan kehati-hatian) serta pengawasan kredit harus dijalankan dengan benar-benar karena stabilitas usaha bank akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit.

Indikator kesehatan usaha perbankan salah satunya juga dapat dinilai dari berhasil tidaknya kredit-kredit yang dikucurkan, dan ini tercermin dari banyak tidaknya tunggakan kredit. Keefektifan penyaluran kredit dapat dilihat dengan rasio NPL (*Non Performing Loan*). Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank. Oleh sebab itu efektifitas Penyaluran kredit harus benar-benar dicapai, karena kinerja bank yang bagus akan memelihara, membangun kepercayaan dan loyalitas yang besar dari para nasabah, serta menciptakan kondisi dimana likuiditas bank tetap terjaga. Efektivitas penyaluran kredit pada suatu bank dapat terlihat dari minimnya jumlah kredit bermasalah, dan adanya keseimbangan antara dana yang disalurkan dengan dana yang dihimpun.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN ALOKASI DANA BANK ”(Studi Kasus pada PT. Bank Jatim Cabang Malang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi alokasi dana bank yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang dalam memaksimalkan dana untuk kredit dengan tetap menjaga likuiditasnya?
2. Apakah penyaluran kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang telah efektif bila diukur dari tingkat LDR dan NPL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang dalam memaksimalkan dana untuk kredit dengan tetap menjaga likuiditasnya.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang bila diukur dari tingkat LDR dan NPL.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Sebagai wahana pelatihan dan bahan referensi penelitian berikutnya dimasa mendatang dan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengoptimalan alokasi dana pada PT. Bank Jatim Cabang Malang untuk menciptakan kondisi likuiditas yang baik disamping peningkatan pemberian kredit guna meminimkan dana yang tidak produktif.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi PT. Bank Jatim Cabang Malang dalam memaksimalkan penyaluran kredit untuk mengoptimalkan alokasi dana bank.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian yang diuraikan menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi teori-teori yang diambil dari pendapat para ahli, baik terdapat dari literatur-literatur, karya ilmiah atau sumber bacaan lain yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini, yaitu masalah tinjauan umum perbankan, sumber dana dan alokasi dana bank, kredit, serta efektivitas penyaluran kredit.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian meliputi sumber dana bank, alokasi dana bank, kredit, sistem dan pengawasan kredit, serta analisis efektifitas penyaluran kredit melalui rasio LDR dan NPL selama 3 periode. Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Bank Jatim Cabang Malang. Selengkapny pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

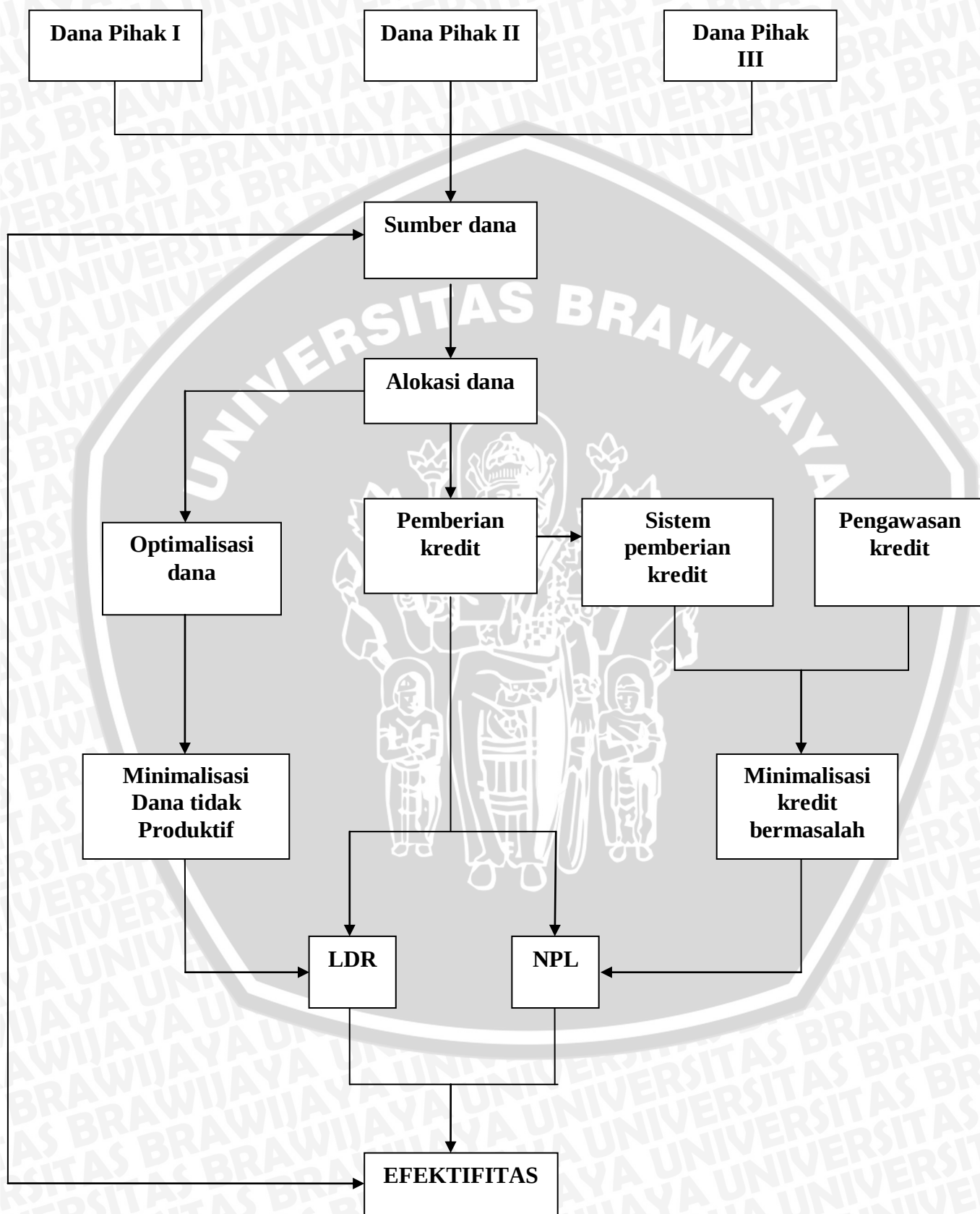
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum PT. Bank Jatim Cabang Malang, penyajian data serta analisis dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian isi penelitian secara singkat, serta dicantumkan pula saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi kredit.

F. Kerangka Pemikiran



Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana pihak kesatu, dana pihak kedua, serta dari dana pihak ketiga. Yang mana dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, sedangkan dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luaran dan yang dimaksud dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana-dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja, maka dari itu usaha alokasi dana untuk tujuan-tujuan yang produktif harus dilakukan oleh bank.

Salah satu bentuk alokasi dana bank yaitu melalui penyaluran kredit, di mana penyaluran kredit tergolong aktiva produktif yang memberikan *return* yang besar daripada penggunaan dana bank untuk pembelian aset lain. Tetapi pemberian kredit merupakan hal yang bertolak belakang dengan likuiditas bank. maka dari itu peningkatan pemberian kredit harus memperhatikan batasan likuiditas dimana salah satunya diukur menggunakan analisa LDR (*loan to Deposits Ratio*). Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan, dan apabila tingkat LDR terlalu rendah hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa bank rugi karena kelebihan dana tidak produktif yang sebenarnya dapat dialokasikan dalam bentuk aktiva lain yang lebih produktif. Maka dari itu efektivitas penyaluran kredit dapat direfleksikan dari tingkat LDR yang pas, dimana jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan kredit tidak lebih besar ataupun jauh lebih kecil dari jumlah dana yang berhasil dihimpun, atau dengan kata lain alokasi dana untuk kredit tetap maksimal tetapi kondisi likuiditas tetap terjaga serta minimalisasi dana tidak produktif dapat dilakukan.

Mengingat penyaluran kredit memiliki tingkat penerimaan yang tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit merupakan penggunaan dana bank yang mengandung resiko yang tinggi yaitu resiko kredit macet. Maka dari itu harus juga diimbangi dengan sistem pemberian dan pengawasan kredit yang benar

agar dapat meminimalisasi timbulnya kredit bermasalah sehingga efektifitas penyaluran kredit dapat tercapai.

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan penyaluran kredit dapat dilihat dengan rasio NPL (*Non performing Loan*). Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Atau dengan kata lain keefektifan penyaluran kredit tidak tercapai dimana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank, sehingga alokasi dana bank juga tidak dapat mencapai titik optimal. Sebaliknya apabila tingkat NPL mampu ditekan serendah mungkin jauh dari batas standar yang ditetapkan, maka penyaluran kredit dapat dikatakan telah efektif karena jumlah kredit bermasalah juga rendah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Istilah bank memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. dari waktu ke waktu pengertian bank mengalami perubahan mengikuti perkembangan jaman.

Menurut Kasmir (2007 : 11), pengertian bank dan lembaga keuangan adalah :

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana."

Pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah "Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sedangkan pengertian bank dalam PSAK No. 31 Tahun 2002 dijelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan), di dalam Dendawijaya (2001:25)

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain"

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana

- b. Menyalurkan dana
- c. Perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat dengan usaha pokok memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Budisantoso, 2006:9):

- a. Lembaga yang berlandaskan kepercayaan (*agent of trust*)
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
- b. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (*agent of development*)
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan pada sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. Lembaga yang memberikan jasa (*agent of service*)
Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis Bank

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2007:19) jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsinya:

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja pihak yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank itu sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri, dalam artian kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional.

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari kemampuan melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah

produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu dengan menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan menerapkan berbagai biaya-biaya nominal atau prosentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

4. Sumber Dana Bank

Dalam suatu perusahaan faktor yang sangat penting adalah keperluan akan modal. Begitu pula dengan bank yang merupakan lembaga keuangan, walaupun bank adalah lembaga perantara keuangan, namun modal merupakan salah satu faktor yang penting.

Menurut (Sinungan (1993 : 84)) di dalam Dendawijaya (2001:53) pengertian sumber dana bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan, dimana sumber modal bank terdiri dari modal sendiri dan modal pihak ketiga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan besar dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman modal yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek atau

surat berharga dalam pasar uang.

Menurut Dendawijaya (2000: 54 – 58) Dana yang dimiliki bank tidak semuanya merupakan dana sendiri sebagian merupakan dana yang berasal dari pihak lain. Dana di dalam bank merupakan dana dari tiga pihak, antara lain:

a. Dana Pihak kesatu (Dana dari modal bank sendiri)

Dana dari modal bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, (jika misalnya bank tersebut telah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut:

1) Modal Disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya sebagian dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

2) Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

3) Cadangan – cadangan

Cadangan – cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

4) Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

b. Dana Pihak Kedua (Dana Pinjaman dari Pihak Luar)

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

1) *Call Money*

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bilamana ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu hanya satu malam saja, pinjaman tersebut disebut *overnight call money*.

2) Pinjaman Biasa Antarbank

Pinjaman biasa antarbank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktu bersifat menengah atau panjang

dengan tingkat bunga relatif lebih ringan.

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya UU tersebut, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

4) Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya, kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya).

c. Dana Pihak Ketiga (Dana dari Masyarakat)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dapat mencapai 80 – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu, sebagai berikut :

1) Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet dan surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Deposito dapat dibedakan sebagai berikut.

i. Deposito berjangka.

Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

ii. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat di buat sebagai jaminan bagi pemohon kredit.

iii. *Deposits on Call*

Deposits on call adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya.

Penghimpunan sumber dana bank sangat penting bagi perkembangan bank. Sebab besar kecilnya volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan besaran dana yang akan diputar nantinya. Yang pastinya jika simpanan yang berhasil terkumpul besar, maka jumlah dana yang akan diputar menjadi kredit akan besar pula dan nanti hasil akhir adalah keuntungan bank yang akan semakin besar.

5. Alokasi Dana bank

Pengalokasian dana bank mutlak dilakukan oleh bank setelah dana berhasil dihimpun. Pengalokasian dana ini bertujuan agar dana-dana yang tersedia di bank dapat diatur dan ditempatkan berdasarkan kebutuhan, supaya tercipta kondisi likuiditas yang stabil.

Menurut Dendawijaya (2000 : 62-68) bank mempunyai beberapa cara dalam mengalokasikan dana dalam rangka mengoptimalkan dana yang ada. Optimalisasi ini terutama guna mencapai kondisi likuiditas dana yaitu :

a. *Primary Reserve* (cadangan primer)

Merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan (pencairan) kredit atau *Credit disbursement*. *Primary reserve* dimaksudkan untuk memenuhi likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Disamping itu juga digunakan untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

b. *Secondary reserve* (cadangan sekunder)

Prioritas kedua dalam alokasi dana adalah penempatan dana-dana ke dalam *non-cash liquid asset* (aset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling liquid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Manfaat *secondary reserve* yaitu untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain:

- 1) Surat berharga pasar uang atau SBPU
- 2) Sertifikat Bank Indonesia atau SBI
- 3) Surat berharga jangka pendek lainnya

c. *Loan portfolio* (kredit)

Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit. Dasar pemikiran adalah setelah bank mencukupi *primary reserve*, serta kebutuhan *secondary reserve*, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang dipengaruhi. Besarnya volume kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu:

1) *Reserve requirement* (RR)

Ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dana dari

pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besar RR telah mengalami perubahan sebagai berikut :

- 1) Sebelum pakto'88 : sebesar 10%
- 2) Setelah pakto'88 : sebesar 2%
- 3) Pada tahun 1996 : sebesar 3%
- 4) Sejak tahun 1997 : sebesar 5%

2) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari pihak ketiga

3) *Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)*

Ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberi kredit (baik nasabah tunggal maupun nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan.

d. *Portfolio Investment*

Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa (*residual fund*) setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga berlikuiditas tinggi. Investasi pada surat-surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas.

Menurut Sinungan (1992 : 93 – 95) alokasi dana bank dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

a. *Non earning assets* (Aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari:

- 1) *Primary reserve* yang berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di bank Indonesia. Dana-dana dalam *primary reserve* adalah untuk kepentingan *cash ratio* atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia selaku bank sentral.
- 2) Penanaman dan dalam benda tetap dan inventaris adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank, seperti gudang kantor, peralatan-peralatan kantor.

b. *Earning asset* (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari:

- 1) *Secondary reserve* berupa harta yang dapat memberikan pendapatan bagi bank dan untuk menjaga likuiditas. Bank akan mengusahakan agar tidak ada dana bank yang *idle* (diam, tidak produktif), karena bila itu terjadi maka bank akan mengalami kerugian.
- 2) Kredit (pinjaman yang diberikan)
- 3) Investasi.

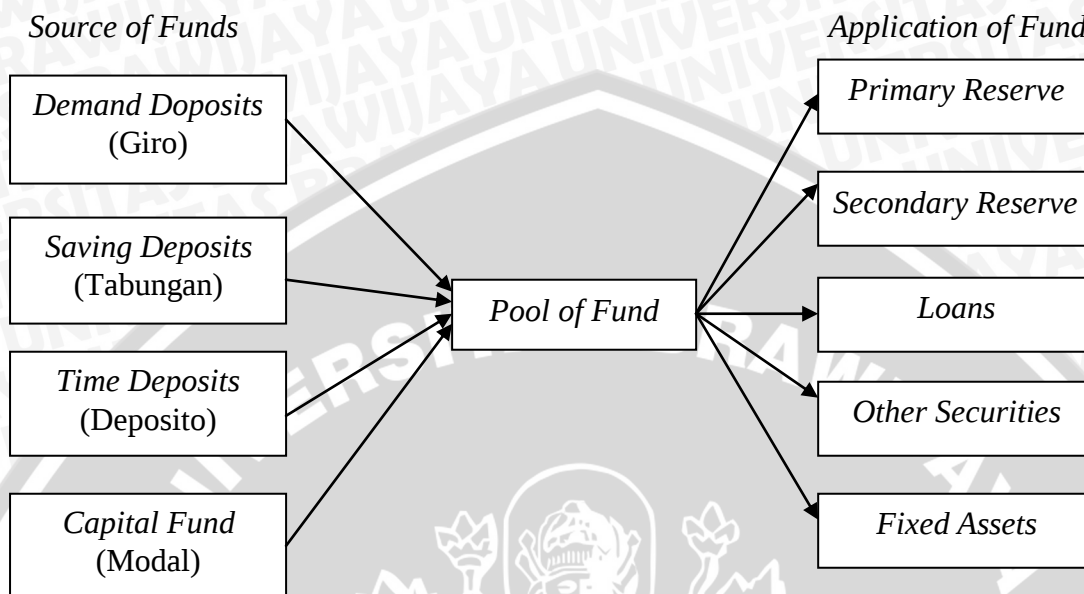
Menurut Dendawijaya (2000 : 60 – 65) Cara penempatan alokasi dana oleh bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperoleh terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak digunakan atau dipilih oleh eksekutif bank, yaitu:

a. *Pool of Fund Approach* yaitu penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat,

jangka waktu dan tingkat harga perolehannya

Gambar 2

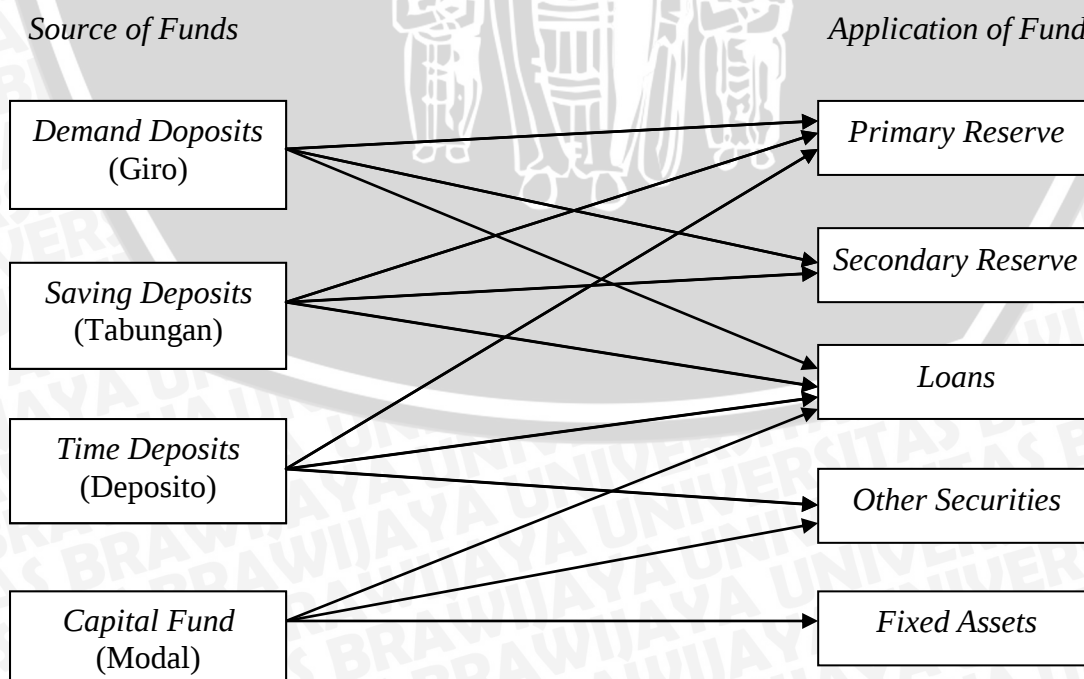
Diagram *Pool of Fund Approach*



b. *Assets Allocation Approach* adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut

Gambar 3

Diagram *Assets Allocation Approach*



Menurut Sudirman (2000: 23 – 24) alokasi dana bank dilakukan dengan cara penanaman dan penggunaan. Penanaman dana bank, misalnya dalam bentuk surat berharga merupakan penanaman dana bank yang dilakukan dalam hal sebuah bank memiliki dana lebih sebelum dijadikan kredit. Jika penggunaan dana untuk kredit dapat dilakukan sehingga tidak terjadi dana lebih dalam sebuah bank, penanaman dana tidak akan terjadi atau jika setelah dilakukan penanaman dana, kredit dapat ditingkatkan sehingga dana yang ditanam atau ditempatkan tersebut diubah kembali menjadi uang kas untuk kemudian dijadikan kredit. Hal ini dilakukan karena penanaman dana tersebut hanya bersifat sementara atau *temporary investment* yang berfungsi sebagai penyangga. Penggunaan dana bank supaya dana tersebut produktif, bank melakukan langkah dengan dasar beberapa pertimbangan:

- a. Penggunaan dana yang sah atau legal dan bank selalu dapat menyediakan dana kas yang likuid untuk memenuhi cadangan wajib bank atau *legal reserve requirement* atau LRR sesuai dengan ketentuan kesehatan bank.
- b. Likuiditas bank selalu dapat dijaga diatas *legal reserve requirement* setelah dikurangi penggunaan atau penempatan dana bank. Kelebihan cadangan wajib bank atau *excess legal reserve requirement* (ELRR) dimaksudkan agar bank selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran setiap saat.
- c. Penyediaan dana untuk kredit selalu disediakan agar pendapatan utama bank (berupa bunga) selalu dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
- d. Penanaman atau penempatan dana bank hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan dana untuk *legal reserve requirement*, *excess legal reserve requirement* dan kredit.

6. Likuiditas Bank

Likuiditas suatu bank mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank. likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan (Budisantoso, 2006:110):

- a. Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral.
- b. Penarikan dana oleh deposan.
- c. Penarikan dana oleh debitor.
- d. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Menurut Budisantoso (2006:111) dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Commercial loan theory* atau *productive theory of credit* atau *real bills doctrine*.

Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pendek dan bersifat *self liquidating*. Kredit jangka pendek ini terutama dalam bentuk kredit modal kerja, sehingga diharapkan dalam jangka pendek debitor dapat mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya.

b. *Asset shiftability theory*.

Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dipelihara apabila aset bank dapat dengan cepat diubah dalam bentuk aset yang lain yang lebih likuid sesuai kebutuhan. Fokus dari pendekatan ini adalah surat berharga, karena surat berharga dipandang cukup mudah untuk dikonversikan menjadi alat likuid. Pinjaman yang diberikan oleh bank diharapkan juga dijamin dengan menggunakan surat berharga.

c. *Doctrine of anticipated income theory*

Pendekatan ini menyatakan bahwa sumber likuiditas bank dapat dipelihara meskipun bank menyalurkan kredit jangka panjang. Lebih jauh pendekatan ini menyatakan bahwa kredit jangka panjang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas apabila jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman direncanakan sebaik mungkin dan betul-betul disesuaikan dengan pendapatan masa mendatang dari debiturnya. Dengan adanya pendekatan ini, bank dimungkinkan untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Kunci keberhasilannya adalah:

- 1) Keberhasilan analisis terhadap tingkat kemampuan nasabah debitor untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
- 2) Keberhasilan estimasi jumlah penghasilan nasabah debitor di masa yang akan datang.
- 3) Keberhasilan estimasi waktu penghasilan diterima nasabah debitor di masa yang akan datang.
- 4) Keberhasilan estimasi terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan usaha debitor yang bersangkutan.
- 5) Keberhasilan analisis terhadap karakter atau kemauan nasabah memenuhi kewajibannya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Oleh karena itu, aktifitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

- a. “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya akan dilakukan

ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati” (Eric L Kotler dalam Teguh Pudjo Muljono, 2001:9-10)

- b. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan Indonesia, Pengertian kredit telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merumuskan sebagai berikut: “Kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

2. Unsur-unsur Kredit

Didalam kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2006:103) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu kredit mencakup masa pengambalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).
- d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka makin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko kredit menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan (Kasmir, 2006:105-106).

Adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan
Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.
- b. Membantu usaha nasabah
Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka akan dapat membantu pihak debitur dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah:
 - 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 - 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 - 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimport dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Menurut (Kasmir, 2006:107-109) disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran uang
Kredit dapat pula menambah atau meperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemberian kredit adalah :

- a. *Profitability* yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan berupa bunga.
- b. Untuk menggairahkan perekonomian yang sedang lesu dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Hasibuan, 2004:88):

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian

- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
- e. Meningkatkan produktivitas yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan
- i. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat
- j. Mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang beragam pula. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2006:109):

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh penggunaan kredit investasi yaitu untuk membangun pabrik baru, membeli mesin produksi dan sebagainya.
 - 2) Kredit modal kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh penggunaan kredit modal kerja yaitu untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit ini yaitu kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang serta kredit pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian.
 - 2) Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
 - 3) Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini seringkali diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh: kredit ini yaitu kredit ekspor dan impor.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1(satu) tahun atau paling lama 1(satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun dan biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kreditpun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai produksi, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha pertambangan.

5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

5. Kebijakan Kredit

Kebijakan perbankan harus diprogram dengan baik dan benar. Program perbankan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis, artinya program perbankan harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan Bank Indonesia. Ekonomis, artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal Limit=BMPK*) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P dari setiap calon peminjam.

Kebijakan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Dalam menetapkan kebijakan perbankan harus diperhatikan 3 asas pokok, yaitu (Muljono, 2001: 20 – 22):

- a. Asas likuiditas, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akan berakibat kepada hilangnya kepercayaan para nasabah atau masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi karena sebagian dana yang berada di bank berasal dari masyarakat. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain:
 - 1) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
 - 2) Bank tersebut memiliki assets lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasar.
 - 3) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk uang.
- b. Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijakan perbankan maka bank harus pandai-pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perbankan maupun surat-surat berharga pada suatu tingkat kegagalan yang sekecil mungkin.
- c. Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Pada negara-negara yang sedang berkembang pendapatan bunga dari bidang perbankan merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi perbankan.

Kebijaksanaan Perkreditan antara lain (Hasibuan, 2004:92-93):

- a. *Bankkable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *effectivened*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan risiko, kebijaksanaan penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat bunga.
 - 1) Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.
 - 2) Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitor). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
- c. Kebijakan Risiko
Kebijakan risiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
- d. Kebijakan Penyebaran Kredit
Kebijakan penyebaran kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah pinjaman yang banyak.
- e. Kebijakan Tingkat Bunga
Kebijakan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

Kebijakan kredit merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepas dari proses pemberian kredit, karena merupakan acuan yang digunakan dalam pelaksanaan kredit. Kebijakan kredit setiap bank berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan yang diterapkan pada bank yang bersangkutan. Tetapi pada dasarnya bank harus mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang pedoman pengajuan kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi administrasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

6. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Penilaian kredit oleh bank dapat

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2006:117):

a. Kepribadian (*character*)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. Kemampuan (*capacity*)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Modal (*capital*)

Capital digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. Kondisi (*condition*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Jaminan (*collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir, 2006:119):

a. Kepribadian (*personality*)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

- b. Penggolongan (*party*)
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. Tujuan (*perpose*)
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam–macam sesuai kebutuhan.
- d. Harapan (*prospect*)
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. Pembayaran (*payment*)
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. Keuntungan (*profitability*)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. Perlindungan (*protection*)
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar–benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2004:108) menambahkan prinsip 3R yaitu:

- a. Pengembalian (*return*)
Adalah penilaian atas yang hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
- b. Kemampuan pengembalian (*repayment capacity*)
Adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. Kemampuan menghadapi resiko (*risk bearing ability*)
Adalah perhitungan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

Disamping menggunakan penilaian dengan 5C, 7P dan 3R, prinsip–prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk menilai

seluruh aspek yang ada. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan usaha menurut Kasmir (2006:120) meliputi :

- a. Aspek yuridis/ hukum
Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.
- b. Aspek pasar dan pemasaran
Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.
- c. Aspek keuangan
Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
- d. Aspek teknis/ operasi
Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan.
- e. Aspek manajemen
Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengamalan sumber daya manusianya.
- f. Aspek sosial ekonomi
Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat.
- g. Aspek amdal
Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

7. Prosedur Umum Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2006:123) secara umum prosedur pemberian kredit oleh

badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

2) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

3) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi :

a) Akte notaris

b) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

c) N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)

d) Neraca dan laporan rugi laba 3(tiga) tahun terakhir

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f) Fotokopi sertifikat jaminan

3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

a) Rasio Lancar (*current ratio*)

b) Rasio kecepatan (*acid test ratio*)

c) Tingkat perputaran persediaan (*inventory turn over*)

d) Rasio penerimaan penjualan(*sales to receivable ratio*)

e) Rasio laba bersih(*profit margin ratio*)

f) Pengembalian harga (*return on the worth*)

g) Modal perusahaan (*working capital*)

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

c. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. Peninjauan lokasi (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan–kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan wawancara I.
- f. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 - 1) Jumlah uang yang akan diterima
 - 2) Jangka waktu kredit
 - 3) Biaya–biaya yang harus dibayar
 - 4) Waktu pencairan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan; antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris
- h. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat– surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran/ penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu; sekaligus atau bertahap.

8. Kolektibilitas Kredit

Dalam rangka pengamanan kredit, perlu diambil langkah-langkah untuk mengkategorikan kredit berdasarkan kelancaran pembayarannya. Pengelompokan kredit berdasarkan keadaan kelancarannya sangat perlu demi kelancaran tugas-tugas pengaman fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada para nasabah. Cara-cara menghadapi nasabah pun dapat disesuaikan sedemikian rupa dengan kelancaran kreditnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas Aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Lancar
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga.
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi:
 - a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran kurang dari satu bulan.

- b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
- 3) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - a) belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
- b. Kurang lancar
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - a) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
 - 2) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
- c. Diragukan

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yaitu:

 - 1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekitar 75% dari hutang pinjaman termasuk bunga.
 - 2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekitar 100% dari hutang peminjam termasuk bunga.
- d. Macet

Yang termasuk kategori macet jika:

 - 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
 - 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
 - 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Negara atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Abdullah, 2003:96)

9. Pengawasan Kredit

Kondisi perekonomian yang selalu dinamis akan membawa dampak pada perkreditan perbankan. Tidak semua kredit yang telah disalurkan akan selalu berjalan dengan lancar. Pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkesinambungan kepada debiturnya agar kredit yang telah diberikan tidak sampai menjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Pengawasan juga harus dilakukan pada pihak intern bank agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat bank yang menangani bidang perkreditan.

Pengertian pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Muljono, 2001:461)

Menurut Hasibuan, (2004:105) tujuan pengendalian (pengawasan) kredit, antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.

Menurut Hasibuan, (2004:105) ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain adalah:

- a. *Internal Control of Credit*
- b. *Audit Control of Credit*
- c. *External Control of Credit*

Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari:

- a. *Preventive Control of Credit*, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
- b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan *liquidation*.

Tujuan pengendalian intern (*internal Control*) adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan (Mulyadi, 2002:180) :

- a. keandalan informasi keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektifitas dan efisiensi operasi.

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern perkreditan menurut (Tawaf 1999:270):

- a. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi agunan.
- b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenali limit cabang dan limit pemberian persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit, dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.
- c. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern, ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal menangani permasalahan dengan nasabahnya.
- d. Harus ada fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantaupelaksanaan *review* tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan *review* serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus-menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Salah satu hal yang cukup penting untuk terjaminnya sistem pengendalian intern adalah terpeliharanya dengan baik file kredit nasabah di bank. Ini merupakan catatan bank terhadap nasabah kreditnya. File kredit yang disimpan di bank berisi berbagai jenis data tergantung jenis kreditnya. Data pokok yang harus ada untuk setiap kredit adalah Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Secara singkat tabel 3 berikut ini memberikan gambaran bagaimana proses Pengendalian Intern berlangsung dalam proses kredit:

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut (Dendawijaya, 2000:86):

- a. *Reshedulling*
Reschedulling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor. *Reschedulling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa berbentuk:
 - 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan. Sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
 - 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.
 - 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap angsuran pokok yang ada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

Tabel 3
Pengendalian Manajemen Dalam Proses Kredit

Aspek-aspek Pengendalian	Proses kredit			
	Saat Permohonan	Saat Proses	Saat Penarikan	Saat Monitoring
1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya	- Personil harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan nasabah	- Punya pengetahuan dan kemampuan menganalisa kredit - Jujur - Obyektif	- Punya pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kredit - Punya pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya.	- Mampu dan mengerti untuk memahami laporan-laporan usaha nasabah - Punya inisiatif bila menemukan hal-hal yang menyimpang dari yang disyaratkan bank
2. Adanya pemisahan tugas	- Petugas penilai jamunan berbeda dengan petugas analisa kredit, dilakukan CI atau <i>Appraisal Company</i> .	- Hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi, seperti pada proses Call Report, Call Memo, MUK.	- Pejabat bank yang melakukan persetujuan/approval atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melakukannya (melalui proses-maker, checker, approval).	- Petugas bank yang mengelola R/K nasabah menginformasikan keadaan R/K nasabah kepada pejabat bagian kredit (AO).
3. Prosedur otorisasi yang tepat	- Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi bank tersebut, Call Report	- Memperhatikan adanya wewenang pemutusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank.	- Hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberikan otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah.	- Petugas bagian kredit memperhatikan catatan dari pejabat bank pada laporan nasabah
4. Dokumen dan catatan yang memadai	- Kelengkapan data permohonan kredit nasabah - Informasi-informasi lain dicatat	- Analisa berdasar data/ informasi selengkap mungkin.	- Kelengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank.	- File perkreditan terpelihara, yang meliputi kredit file serta data mengenai nasabah
5. Kontrol fisik aktiva dan catatan	- Pemeriksaan di tempat (on the spot) atas usaha/ proyek nasabah maupun jaminan kredit	- Analisis berdasar pada hasil pemeriksaan ditempat (on the spot)	- Penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah. - Dokumen-dokumen milik nasabah yang dititipkan ke bank disimpan pada tempat yang aman	- Diadakan pemeriksaan on the spot secara teratur atas usaha/ pabrik/ proyek maupun stok nasabah. - Diadakan ricek antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan ditempat
6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen	- Untuk memastikan berfungsinya maka perlu ada pemeriksaan yang pemeriksaan tersebut pada	- Sistem pengendalian dalam kegiatan bersifat independent yg dilakukan pokoknya adalah beris dorongan	- Perkreditan seperti yang dikemukakan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk lebih mendinamisir sistem	- kan pada butir 1 sampai 5 diatas, (SKAI). Rekomendasi hasil pengendalian

Sumber: Tawaf, 1999: 280

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat bunga kredit
- 2) Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (*loan disbursement*) antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing akan melaksanakan proyek, tetapi tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- 3) Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitor kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijaminkan ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat ataupun berupa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga, dan terdapat perubahan dalam daftar mesin dan peralatan yang dibeli debitor bagi proyeknya berdasarkan nasehat dari konsultan atau supplier mesin di luar negeri.
- 4) Jenis serta besarnya beberapa *fee* yang harus dibayar debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitor oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit)
- 5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank ataupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk oleh bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitor dalam rangka penyelamatan proyek.
- 6) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

c. *Restructuring*

Restructuring, restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitor karena dalam rangka *rescue-program*. Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit. Langkah yang diambil BI untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa : “Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi ke-wajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 3) pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 4) perpanjangan jangka waktu kredit;
- 5) penambahan fasilitas kredit;

- 6) pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.”
- d. Kombinasi 3-R
- Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescu program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restucturing* tersebut di atas.
- e. Eksekusi
- Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain:
- 1) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara)
 - 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (Perkara Perdata)

C. Efektivitas Penyaluran Kredit

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit harus dilakukan selektif mungkin. Keefektifan penyaluran kredit masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan tiap-tiap bank. Untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran kredit digunakan rasio-rasio sebagai alat ukur yaitu:

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR adalah rasio keuangan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya. LDR digunakan untuk menentukan volume kredit, alokasi kredit, serta mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau realatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Taswan, 2006: 165)

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2000:117-119). Sebagian praktisi

perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2003:272), batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110 %.

Menurut Sudirman (2000 : 193-194) Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Dari segi LDR, usaha meningkatkan kesejahteraan bank dapat ditempuh cara:

- Mengurangi kredit yang diberikan oleh bank pada debitur dengan dana yang diterima dalam jumlah tertentu.
- Dengan jumlah kredit tertentu dana yang diterima oleh bank dinaikkan, diusahakan peningkatan itu dari modal inti dan modal pinjaman.
- Pengurangan atau penambahan kredit lebih besar dari pengurangan atau penambahan dana yang diterima bank.

Tabel 4
Tingkat Kesehatan Bank
Dari Segi LDR

RASIO	NILAI KREDIT	PREDIKAT
115,00 – 102,50	0 – 50	Tidak sehat
102,25 – 98,75	51 – 65	Kurang sehat
98,50 – 95,00	66 – 80	Cukup sehat
94,75 – 90,00	81 - 100	Sehat

2. *Non Performing Loans (NPL)*

Rasio perbaikan asset terdiri dari (Riyadi,2004:141):

Non Performing Loan (NPL) Gross

NPL Gross adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.

Rumus:

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 s/d 5}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Non Performing Loan (NPL) Net

Rumus:

$$\text{NPL Net} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kol. 3 s/d 5-PPAP khusus kol.3 s/d 5}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Non Performing Loans atau kredit bermasalah yang ada disetiap bank tidak boleh lebih dari 5%. Karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, dimana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran analisa data secara ilmiah. Metode penelitian ilmiah juga diterapkan pada usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain serta masalah yang ditimbulkan. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah serta teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikannya apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang oleh subyek yang diteliti (Subana, 2005:27). Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan, mengevaluasi masalah yang terjadi dan mencari solusi dari masalah tersebut.

Sebuah pendekatan mengisyaratkan sejumlah kriteria untuk menyeleksi data yang dianggap relevan. Sebuah pendekatan mencakup didalamnya standar dan cara kerja atau prosedur tertentu dalam proses penelitian, termasuk misalnya memilih dan merumuskan masalah, menjaring data, serta menentukan unit analisis yang akan diteliti dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label atau nama yang bersifat umum dari sebuah rumpun besar metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menyesuaikan data-data yang ada lalu mendeskripsikannya serta memberi penafsiran untuk membuat gambaran yang melukiskan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Penelitian kualitatif memiliki berbagai variasi atau jenis-jenis metode. Salah satunya adalah metode studi kasus. Studi kasus dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Robert Yin dalam Bungin, 2003:20). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 2002:120). Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus merupakan metode penelitian untuk memperoleh gambaran tentang situasi atau kejadian mengenai fenomena yang terjadi, membuat prediksi serta mendapatkan kesimpulan melalui penemuan masalah beserta uraian tersebut.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tertuju pada masalah penelitian, tidak sampai menyimpang dari pokok bahasan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Sumber dana bank
Untuk mengetahui berbagai sumber dana bank. Terutama mengenai jenis dana, jangka waktu, bunga, serta komposisi dari dana tersebut.
2. Alokasi dana
Untuk mengetahui pengalokasian dana bank, terutama dalam hal penempatan dana bank ke dalam pos-pos cadangan dan kredit.
3. Kredit.
Untuk mengetahui jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank. Terutama mengenai komposisi kredit yang disalurkan, jumlah dan batasan-batasan pemberian kredit.

4. Sistem pemberian kredit

Mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada PT Bank Jatim Cabang Malang, serta mengetahui bentuk struktur organisasi dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang masing-masing yang mendukung terciptanya efektifitas penyaluran kredit.

5. Pengawasan kredit

Mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang dalam menekan tunggakan kredit.

6. Analisis efektivitas penyaluran kredit melalui rasio LDR dan NPL selama 3 periode.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Jatim Cabang Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 26–28 Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena PT. Bank Jatim sebagai bank umum pemerintah daerah yang berorientasi mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup rakyat.

D. Sumber Data

Arikunto (1998 : 114) mendefinisikan data adalah sebagai hasil pencatatan peneliti, baik berupa angka, huruf, atau simbol-simbol lain. sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data yang berkepentingan adalah bagian perkreditan PT. Bank Jatim Cabang Malang. Data yang diperoleh antara lain: data bank mengenai jenis kredit, ketentuan pokok kredit secara umum, kebijakan kredit, serta sistem pemberian kredit secara umum.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang kemudian diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer, seperti berbentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, *paper*, studi kepustakaan yang dipublikasikan pihak bank. Selain itu dengan

menggunakan data *time series* laporan keuangan bank mulai tahun 2006-2008.

E. Metode Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data yang tepat akan memudahkan dan mengarahkan dalam mengelola serta menganalisa data lebih lanjut. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan tertuju pada obyek penelitian, kemudian mencatat apa yang telah diamati untuk pemenuhan tujuan penelitian.

2. Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan pihak responden yang terkait dengan obyek penelitian yaitu pimpinan dan bagian perkreditan. Data yang diperlukan dalam *interview* adalah mengenai sistem pemberian dan pengawasan kredit, kebijaksanaan kredit, serta pengalokasian dana bank.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, arsip-arsip, laporan dan peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini diperlukan untuk mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan catatan masa lalu yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk diteliti lebih lanjut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (1998 : 137) adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkannya.

Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan Langsung

Adalah pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk menangkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dengan berlandaskan teori dan pengetahuan dari peneliti.

2. Panduan Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Instrumen penelitian dengan dokumentasi menggunakan buku catatan (*field note*), yang bermanfaat untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan. Instrumen ini digunakan agar peneliti dapat terhindar dari kesalahan terhadap apa yang akan diamati.

G. Analisa Data

Analisa data digunakan untuk mengolah data mentah agar lebih bermakna dalam penyajiannya sehingga bisa memberikan alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan tujuan dari analisa data adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan tersusun.

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian, jadi apabila data tersebut tidak dianalisa maka tidak akan ada gunanya.

Menurut Arikunto (2002 : 313) data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan standart atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat bersifat statistik dan non statistik, dan penelitian ini menggunakan data non-statistik dimana analisisnya mencari proporsi, presentasi dan rasio.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif dan kuantitatif, dimana analisa kualitatif merupakan analisa data dengan cara memberikan penjelasan dengan kata-kata atau kalimat untuk menerangkan data mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit dalam rangka mengoptimalkan alokasi dana pada PT. Bank Jatim Cabang Malang. Sedangkan analisa kuantitatif merupakan analisa data dengan cara data-data yang berbentuk angka dikumpulkan, dianalisis, serta dibandingkan antara data yang satu dengan

data yang lainnya dengan melakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan formula yang berhubungan dengan masalah kegiatan penyaluran kredit dan optimalisasi alokasi dana bank yaitu dengan menggunakan rasio-rasio diantaranya LDR (*Loan Deposits to Ratio*) dan NPL (*Non Performing Loan*).

Dengan demikian langkah-langkah dalam analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan berbagai bentuk sumber dana bank sesuai dengan jenis, dan karakter dari dana tersebut, yaitu ditinjau dari jangka waktu, bunga, serta pertimbangan lain pihak PT. Bank Jatim Cabang Malang.
2. Menjabarkan pengalokasian dana bank, apakah penempatan dana yang dimiliki telah optimal. Tolak ukur alokasi dana adalah adanya penempatan dana ke dalam pos-pos, yaitu penggunaan dana untuk cadangan dan kredit sesuai dengan tingkat likuiditasnya, supaya kondisi likuiditas bank tetap terjaga namun tidak terjadi endapan dana yang besar.
3. Menjabarkan berbagai jenis kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang, tujuannya adalah apakah kredit yang disalurkan mencakup banyak sektor, juga besaran kredit yang disalurkan untuk mengetahui tingkat resiko kredit yang diberikan, serta batasan wewenang pemberian kredit.
4. Menggambarkan sistem pemberian kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang secara umum, yang mana di dalamnya juga akan diulas mengenai bentuk struktur organisasi yang berkaitan dengan job description, apakah struktur organisasi tersebut telah memenuhi syarat pemisahan fungsi secara wajar. Tolak ukur sistem pemberian kredit yang baik adalah disusun dengan memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem dan prosedur itu harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang baik. Serta memenuhi prinsip aman agar kredit yang diberikan tidak bermasalah dan keamanan *asset* bank terjaga. Tolak ukur struktur organisasi adalah adanya pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas di mana suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahapan suatu transaksi.
5. Menjabarkan pengawasan dan pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang sebelum dan sesudah kredit dikucurkan.

6. Menganalisis tingkat keberhasilan kredit yang disalurkan terkait dengan optimalisasi alokasi dana yang telah dihimpun oleh bank, yaitu dengan cara menghitung nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dari tahun 2006 sampai dengan 2008, kemudian membandingkan hasil perhitungan tersebut. LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Batas dari *Loan to deposit ratio* dimana bank dikatakan sehat berkisar antara 90% - 94,75%

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak III}} \times 100\%$$

7. Menganalisis tingkat keberhasilan kredit yang disalurkan terkait dengan minimalisasi kredit bermasalah, dengan cara menghitung nilai *Non Performing Loan* (NPL) dari tahun 2006 sampai dengan 2008, kemudian membandingkan hasil perhitungan tersebut. NPL adalah kredit bermasalah atau tidak lancar sebagai akibat dari debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar. Batas dari NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Jatim

PT. Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan PT. Bank Jatim. Berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 berdasarkan akta Notaris Anwar Mahajudin no. 91 dan dengan ijin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan terbatas (PT). Berdasarkan pada Undang-undang no.13 tahun 1961 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah serta Undang-Undang no.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dilakukan penyempurnaan melalui peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur no.2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Penyempurnaan tersebut yang semula berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah menetapkan dirinya dengan menyandang status sebagai Bank Devisa, hal itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan hukum PD menjadi PT. Sesuai dengan Akta Notaris tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Mei 1999, dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999, tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor 3008 maka secara resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berstatus menjadi PT. Bank Jawa Timur. Sebagai salah satu bank peserta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002 PT. Bank Jatim telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian program rekapitalisasi. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, penerapan *prudential banking* dan pengendalian resiko yang lebih baik serta dukungan dari semua pihak, PT. Bank Jatim semakin mantap dalam melangkah guna memberikan yang terbaik bagi para nasabahnya.

2. Lokasi PT Bank Jatim Cabang Malang

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang atau yang biasa disebut dengan PT. Bank Jatim Cabang Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 26 – 28 Malang. Letak PT Bank Jatim Cabang Malang sangat strategis, karena berada di pusat kota yang lalu lintasnya cukup padat, sehingga keberadaan PT. Bank Jatim mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Hal itu mendorong PT. Bank Jatim Cabang Malang untuk meningkatkan usaha terutama di bidang pelayanan nasabah, sehingga jumlah nasabah yang ingin bergabung semakin banyak dan bertambah. Hal ini berarti PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat diterima oleh Masyarakat. PT. Bank Jatim juga merupakan salah satu Bank yang memberikan jasa Kredit Umum Modal Kerja kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari PT. Bank Jatim yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup rakyat.

3. Motto dan Slogan PT. Bank Jatim Cabang Malang

a. Motto

Dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri bagi masyarakat terhadap PT. Bank Jatim maka telah ditetapkan motto PT. Bank Jatim “Aman Terpercaya” dengan maksud Bank Menjamin keselamatan dana maupun kepentingan pihak lain yang diamanahkan kepada PT. Bank Jatim, serta mampu melaksanakan tugas dan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

b. Slogan

PT. Bank Jatim memiliki memiliki slogan “ Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur” Artinya PT. Bank Jatim berupaya mensejahterakan pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, integritas serta profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personil.

4. Visi dan Misi PT. Bank Jatim Cabang Malang

a. Visi

Adapun visi dari PT. Bank Jatim adalah “Menjadi Bank yang sehat, berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumberdaya manusia yang profesional”.

b. Misi

Adapun misi dari PT. Bank Jatim adalah “Mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah serta ikut mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal”.

B. Sumber Dana

1. Sumber Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang

Bank Jatim Cabang Malang termasuk bank umum, di mana berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat. Kegiatan usaha dari Bank Jatim Cabang Malang ini sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna pembiayaan kegiatan usaha atau keperluan konsumsi masyarakat. Selain kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut, bank juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Wewenang kantor cabang adalah mengelola dana simpanan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dari masyarakat, pihak yang memiliki hubungan istimewa, maupun mengelola simpanan dari bank lain. Sumber dana yang lain adalah dana pihak kedua, yaitu pinjaman dari pihak luar, dimana wewenang Bank Jatim Cabang Malang hanya menerima pinjaman dari pemerintah daerah setempat, selebihnya merupakan wewenang kantor pusat. Demikian pula dana pihak pertama seperti modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan, dan laba ditahan, juga merupakan wewenang kantor pusat. Dapat disimpulkan sumber dana Bank Jatim Cabang Malang diperoleh melalui:

1) Pengelolaan dana kas daerah

Dalam rangka pengurusan administrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka PT. Bank Jatim ditunjuk sebagai pemegang kas daerah. Uang daerah tersebut digunakan untuk pemberian kredit jangka pendek terutama guna menunjang pembangunan daerah. Selain itu salah satu sumber dana Bank Jatim Cabang Malang diperoleh dari pinjaman pemerintah daerah.

2) Pengelolaan dana simpanan

Pengelolaan dana simpanan terutama diperoleh dari simpanan masyarakat, pihak yang memiliki hubungan istimewa, maupun mengelola simpanan dari bank lain yang diwujudkan dalam:

a) Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Setoran pertama untuk nasabah perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan saldo terendah per bulan Rp. 750.000,- sedangkan setoran pertama untuk perusahaan minimal Rp. 2.000.000,- dan saldo terendah per bulan Rp. 1.500.000,-.

b) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank Jatim

Jenis deposito yang ada di Bank Jatim, terdiri dari:

(1) Deposito Berjangka Rupiah

Merupakan simpanan pihak ketiga dalam rupiah, dimana pencairannya tergantung dari kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nominal minimal untuk memiliki deposito berjangka rupiah adalah Rp. 1.000.000, dan berikut jangka waktu serta suku bunga yang diberikan:

Jangka Waktu	Rate (%)
1 Bulan	6,00
3 Bulan	6,25
6 Bulan	6,25
12 Bulan	6,50

Kelebihan deposito berjangka rupiah adalah suku bunga bersaing, diatas Rp. 50.000.000,- *rate* nego (kewenangan PC 0,50% dibawah penjaminan), memberi kepastian untuk memupuk dana, fasilitas perpanjangan otomatis (ARO- *Automatic Roll Over*), dan kelebihan yang lain adalah dapat dijadikan jaminan kredit

(2) Deposito Berjangka Valas

Merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai degan yang diperjanjikan. Nominal minimal untuk memiliki deposito berjangka valas adalah USD 1.000 atau ekuivalen. Berikut jangka waktu dan suku bunga yang diberikan:

Jangka Waktu	Rate (%)
1 Bulan	2,50
3 Bulan	2,50
6 Bulan	2,50
12 Bulan	2,50

Keuntungan deposito berjangka valas yaitu suku bunga bersaing, memberi kepastian pada nasabah untuk memupuk dana, terdapat fasilitas perpanjangan otomatis (ARO) dan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

c) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, Bilyet Giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Macam tabungan terdiri dari:

(1) Tabungan Siklus (traDisi KeLuarga Sejahtera)

Tabungan Siklus merupakan jenis tabungan eksklusif dengan bunga yang bersaing dan didukung fasilitas ATM bersama, serta dapat dilakukan transaksi baik setoran maupun pengambilan di seluruh Kantor Cabang Bank Jatim. Kelebihan tabungan Siklus akan dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

(2) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan Simpeda merupakan salah satu jenis tabungan yang

memberikan keistimewaan bagi nasabah. Selain bunga yang menarik, juga didukung fasilitas ATM Bersama. Tabungan Simpeda juga dapat sebagai jaminan kredit. Selain itu tabungan Simpeda juga memberikan hadiah yang menarik melalui undian.

(3) Tabungan NASA (tuNAs BangSA)

Tabungan NASA adalah produk tabungan PT. Bank Jatim yang merupakan wahana atau sarana guna menampung dana dari donatur untuk dikelola, diadministrasikan, dan selanjutnya disalurkan kepada siswa dalam bentuk bea-siswa guna kelangsungan pendidikan anak-anak kurang mampu.

(4) Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk tabungan PT. Bank Jatim yang merupakan sarana untuk meringankan beban nasabah menuju Baitullah. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank Jatim.

(5) Tabungan Bukades

Tabungan Bukades adalah produk tabungan PT. Bank Jatim bagi masyarakat desa baik secara perorangan maupun secara kelompok.

Berikut besarnya suku bunga tabungan pada bank jatim:

Tabungan	Rate
BUKADES <= 1 Juta	4%
BUKADES > 1 Juta	5%
HAJI	4%
NASA	4%
SIKLUS	3,75%
SIMPEDA	2,75%

d) Cek DINDA (DImana aNda beraDA)

Cek DINDA adalah Cek perjalanan atau *travelers cheks* yang sangat berguna sebagai bekal perjalanan anda atau sebagai souvenir atau hadiah bagi relasi bisnis.

3) Pinjaman

Sumber dana yang lain yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank indonesia dan dari pemerintah daerah setempat.

2. Analisis Sumber Dana

Tabel 5
Komposisi Sumber Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang

dalam jutaan rupiah terkecuali persentase

	%	2006	%	2007	%	2008
Simpanan nasabah						
Pihak yang mempunyai hub. Istimewa	30,66%	241.291	30,30%	197.119	12,00%	75.137
Pihak ketiga	69,20%	544.619	69,51%	452.275	87,89%	550.670
Jumlah simpanan	99,86%	785.910	99,81%	649.394	99,89%	625.807
Simpanan dari bank lain						
Pihak yang memiliki hub. Istimewa		0		0		0
Pihak ketiga		1.030		1.190		509
Jumlah simpanan dari bank lain	0,13%	1.030	0,18%	1.190	0,08%	509
pinjaman yang diterima						
Pinjaman dari pemerintah		90		72		171
Jumlah pinjaman	0,01%	90	0,01%	72	0,03%	171
TOTAL SUMBER DANA	100%	787.030	100%	650.656	100%	626.487

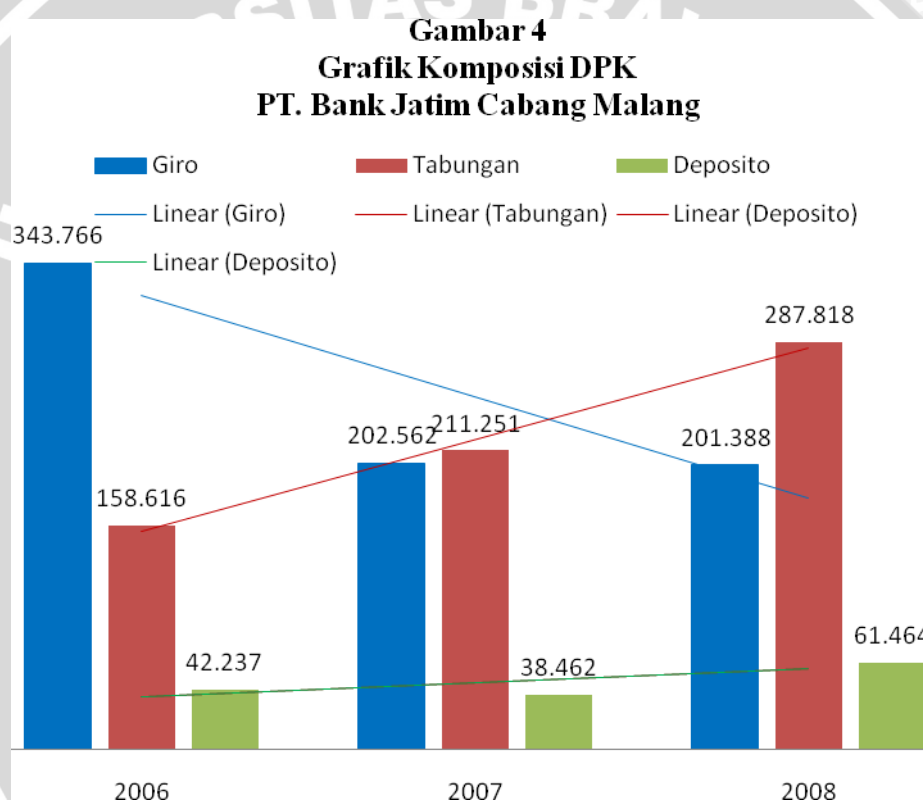
sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 5, dimana total sumber dana dijadikan sebagai pos dasar dengan persentase sebesar 100%, dapat diketahui bahwa sumber dana PT. Bank Jatim Cabang Malang tahun 2006-2008 hampir secara keseluruhan diperoleh dari simpanan nasabah. Persentase untuk simpanan nasabah dari tahun 2006-2008 adalah sebesar 99%, sedangkan 1% sumber dana yang lain diperoleh dari pinjaman pemerintah daerah serta simpanan bank lain diantaranya BPR Artha Kanjuruhan, BTPN Malang, BPR Tugu Artha PD, BPR Bali Catur Mandiri, dan BPR Jatim dalam bentuk giro dan tabungan.

Sumber dana yang diperoleh dari simpanan nasabah dihimpun dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dari pihak ketiga, yang tidak lain adalah masyarakat luas. Tahun 2006-2008 lebih dari 65% sumber dana diperoleh dari masyarakat dan sisanya diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu pemerintah kota dan kabupaten Malang. PT. Bank Jatim Cabang Malang sebagai pemegang kas daerah hanya menghimpun dana pemerintah dalam bentuk Giro, tidak untuk tabungan dan deposito. Sedangkan simpanan dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu giro, deposito, dan tabungan. Dapat kita simpulkan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan

sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 65%-85% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

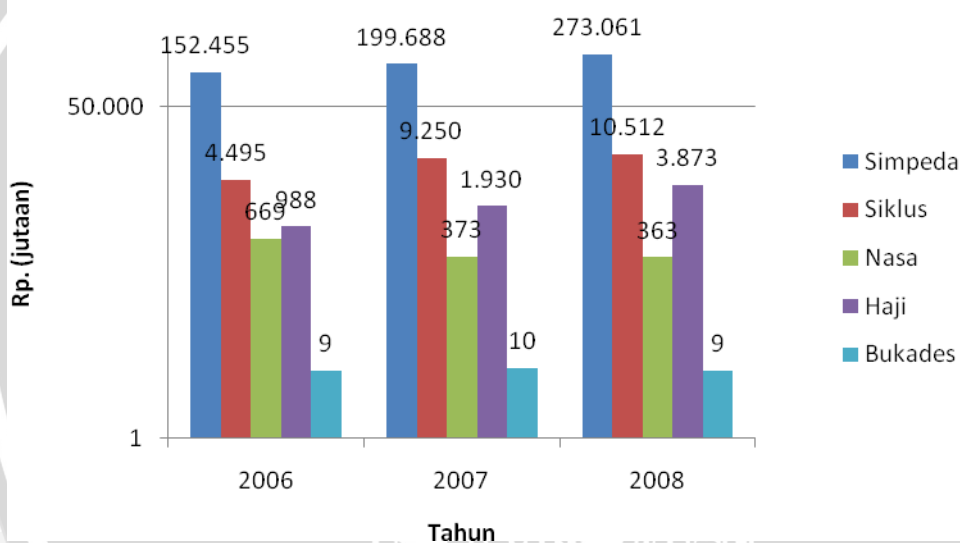
Penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat pada PT. Bank Jatim Cabang Malang didominasi dari dana tabungan, setelah itu giro dan yang terakhir adalah deposito. Penyerapan dana dalam bentuk giro dari tahun ketahun mengalami penurunan yang cukup tajam, tidak seperti tabungan yang dari tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatan. Berbeda dengan giro dan tabungan, kondisi deposito menurun di tahun 2007 kemudian meningkat lagi di tahun 2008, seperti nampak pada grafik di bawah ini.



Grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat Malang cenderung memilih menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ini disebabkan karena simpanan dalam bentuk tabungan bisa diambil sewaktu-waktu, dibandingkan deposito yang jangka waktu penarikannya ditentukan. Walaupun giro penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi masih sebagian kalangan saja yang menggunakannya, tidak semua masyarakat membutuhkan kegunaan dari giro itu sendiri. Selain alasan tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan mengapa masyarakat cenderung memilih menyimpan uangnya dalam bentuk

tabungan, dibanding giro dan deposito. Dalam tabungan yang berhasil dihimpun oleh Bank Jatim Cabang Malang, jenis tabungan yang dananya paling banyak adalah tabungan Simpeda yang kedua Siklus, Haji, kemudian Nasa dan yang terakhir adalah tabungan Bukades. Komposisi dana tabungan dan pertumbuhannya dapat terlihat pada gambar 5 dibawah ini. Peningkatan tabungan simpeda dari tahun 2006-2008 tentunya tidak lepas dari promosi gencar yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang. Pada saat ini promosi yang dilakukan untuk tabungan dengan jenis Simpeda adalah dengan memberikan undian berhadiah berupa mobil dan juga hadiah lain

Gambar 5
Grafik Pertumbuhan Tabungan PT. Bank Jatim Cabang Malang

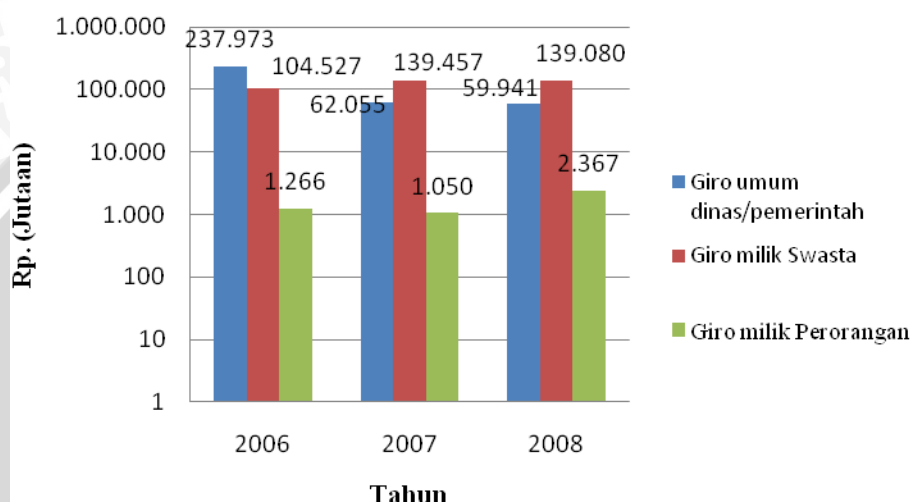


Jenis tabungan selain simpeda pada gambar 5, menunjukkan nominal yang berada jauh di bawah simpeda. Dengan kondisi yang demikian ini sebaiknya Bank Jatim Cabang Malang tidak hanya memfokuskan pada produk tabungan simpeda saja, tetapi juga untunk tabungan siklus yang sebenarnya berpotensi besar untuk dapat ditingkatkan, demikian pula dengan produk yang lain, sehingga besarnya sumber dana yang diperoleh dapat lebih meningkat.

Simpanan mayarakat berikutnya adalah giro. Dari grafik pada gambar 6 dapat diketahui bahwa jenis giro yang ada pada PT. Bank Jatim Cabang Malang ada tiga yaitu giro umum dinas/ pemerintah, giro milik swasta dan selanjutnya adalah giro milik perorangan. Dari tahun 2006-2008 nominal giro yang cukup stabil ada pada

giro milik swasta yaitu sekitar 105 milyar di tahun 2006; 139 milyar di tahun 2007 dan 2008. Kondisi giro umum dinas dari tahun 2006-2008 cenderung mengalami penurunan, sedangkan giro milik perorangan merupakan giro yang jumlah nominalnya paling kecil dibanding lainnya yaitu sekitar 1-2 milyar.

Gambar 6
Grafik Pertumbuhan Giro PT. Bank Jatim Cabang Malang

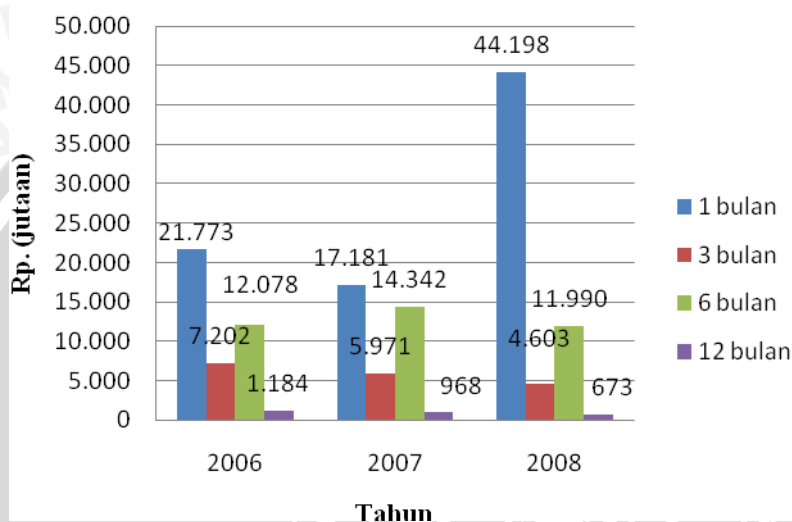


Selain pada giro dan tabungan, simpanan masyarakat juga dapat berupa deposito. Deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang Malang yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah deposito dengan jangka waktu 1 bulan, setelah itu yang berjangka waktu 6 bulan, 3 bulan dan yang terakhir 12 bulan seperti tampak dari grafik pada gambar 7. Deposito dengan jangka waktu 1 bulan banyak karena nasabah cenderung ingin menikmati bunga deposito setiap bulan, dan dana deposito tersebut dapat ditarik apabila telah jatuh tempo, mengingat jangka waktunya yang singkat. Apabila deposito telah jatuh tempo dan nasabah tidak mengambil dananya maka ada fasilitas perpanjangan otomatis (ARO- *Automatic Roll Over*), hal inilah yang disukai para nasabah.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah karena sumber dana masyarakat yang terhimpun didominasi oleh tabungan dan ditambah dengan giro yang merupakan simpanan yang juga dapat diambil sewaktu-waktu, serta deposito dengan jangka waktu satu bulan yang paling mendominasi, berarti PT. Bank Jatim Cabang Malang harus memiliki tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu oleh nasabah. Selain itu, dana pihak III yang

tersimpan mulai 2006-2008 tergolong masih harus ditingkatkan mengingat hanya ada beberapa produk yang mendominasi. Kinerja dari FO (*funding Officer*) harus lebih ditingkatkan, dan fasilitas penunjang dari PT. Bank Jatim Cabang Malang seperti ATM juga harus ditambah melihat Jumlah ATM Bank Jatim sendiri untuk wilayah malang hanya terdapat di kantor cabang pusat.

Gambar 7
Grafik pertumbuhan deposito PT. Bank Jatim
Cabang Malang



C. Alokasi Dana

1. Alokasi Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang

Setelah dana-dana berhasil dihimpun, dana tersebut akan disalurkan dalam berbagai bentuk alokasi. Prioritas utama PT. Bank Jatim Cabang Malang dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk cadangan primer yang dalam prakteknya adalah dana dalam kas dan saldo rekening koran atau giro pada bank lain. Untuk penempatan dana guna memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu berupa giro wajib minimum pada Bank Indonesia hanya dilaporkan oleh kantor pusat saja. Cadangan primer disini dijadikan prioritas utama yaitu untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada Bank Jatim maupun untuk pencairan kredit, kliring antarbank dan kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

Alokasi selanjutnya, setelah prioritas utama terpenuhi dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk kredit. Bank Jatim Cabang Malang sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan diantaranya:

1. *Loan to deposit ratio* (LDR)

Loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga. LDR oleh Bank Jatim dianggap sebagai tolak ukur untuk menilai kesehatan dari segi likuiditas, sehingga pemantauan untuk besarnya LDR selalu dilakukan dari tahun ketahunnya.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Bank Jatim Cabang Malang selalu memegang teguh peraturan mengenai batas maksimum pemberian kredit, dimana tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit (baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal yang ada pada Bank Jatim. Besarnya plafond untuk tiap-tiap jenis kredit telah ditetapkan oleh Bank Jatim Pusat baik itu nilai minimalnya maupun maksimalnya. Apabila ada permohonan kredit di atas plafond maksimum yang telah ditetapkan, maka dalam persetujuannya harus melalui kantor pusat dan harus memenuhi syarat tambahan baik mengenai agunan maupun persyaratan lainnya.

Alokasi dana lainnya yang dilakukan PT.Bank Jatim Cabang malang adalah penempatan dana ke dalam *noncash liquid asset* (aset likuid bukan kas) berupa sertifikat Bank Indonesia (SBI). Yaitu surat berharga yang sangat likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang lain seperti surat berharga pasar uang (SBPU) dan surat berharga jangka pendek lainnya hanya dilakukan oleh kantor pusat saja.

Penanaman dana bank yang terakhir adalah penanaman dalam bentuk aktiva tetap seperti tanah, pembangunan kantor cabang, peralatan operasional bank , dan lain-lainnya yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan operasional bank.

2. Analisis Alokasi Dana

Tabel 6
Komposisi Alokasi Dana PT. Bank Jatim Cabang Malang

dalam jutaan rupiah terkecuali persentase

Jenis-jenis Alokasi Dana Bank	%	2006	%	2007	%	2008
Primary Reserve						
Kas	18,53%	95.266	16,63%	100.089	17,83%	97.777
Giro pada Bank lain	0,01%	58	0,00%	0	0,00%	5
Jumlah Primary Reserve	18,54%	95.324	16,63%	100.089	17,83%	97.782
Secondary Reserve						
Efek-efek (SBI)	19,45%	100.000	21,18%	127.500	0,00%	0
Jumlah Secondary Reserve	19,45%	100.000	21,18%	127.500	0,00%	0
Kredit						
pihak ketiga	60,93%	313.317	61,25%	368.767	80,94%	443.884
Jumlah Kredit	60,93%	313.317	61,25%	368.767	80,94%	443.884
fixed Assets (Aktiva Tetap)						
Jumlah Aktiva tetap	1,09%	5.613	0,94%	5.667	1,22%	6.713
Total Alokasi Dana	100,00%	514.254	100,00%	602.023	100,00%	548.379

sumber: data diolah

Terlihat pada tabel 6 dari keseluruhan total alokasi dana pada Bank Jatim Cabang Malang alokasi dana terbesar adalah untuk kredit yaitu 60,93% di tahun 2006; 61,25% di tahun 2007; dan 80,94% pada tahun 2008, peningkatan pemberian kredit terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kegiatan utama Bank Jatim Cabang Malang adalah penyaluran kredit. Coba kita bandingkan dengan alokasi dana untuk SBI yang sebesar 19,45% pada 2006; 21,18% pada tahun 2007 dan sama sekali tidak pada tahun 2008. Tentunya berbeda jauh, besaran alokasi yang dilakukan bank untuk kredit dan untuk SBI, padahal yang kita ketahui bahwa penanaman dana dalam bentuk SBI notabennya adalah penanaman dana yang disukai oleh semua bank karena bersifat likuid dengan resiko yang nyaris tidak ada, tetapi penanaman dana untuk kredit memang lebih dapat memberikan pemasukan yang besar terhadap pihak bank dibandingkan dengan SBI. Prioritas alokasi dana bank berupa cadangan primer untuk menjaga likuiditas bank adalah sebesar 18,54% di tahun 2006; 16,63% di tahun 2007, dan sebesar 17,83% pada tahun 2008. Penempatan dana dalam cadangan primer tidak boleh berlebihan, karena apabila berlebihan akan berakibat

banyak dana yang *idle* (tidak produktif), tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit karena ditakutkan bank tidak dapat memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah, dan kegiatan operasional bank juga akan terhambat, jadi penanaman dana untuk cadangan primer haruslah cukup. Alokasi yang terakhir adalah pada aktiva tetap, yaitu sebesar 1,09% pada 2006; 0,94% pada 2007; dan sebesar 1,22% pada tahun 2008. Dapat dikatakan alokasi dana untuk aktiva tetap adalah alokasi yang terkecil, hal ini dikarenakan sifatnya yang tidak memberikan hasil bagi bank serta merupakan alokasi dana yang tidak terkait dengan strategi menjaga likuiditas bank.

Berdasarkan tabel 6 dan dari berbagai penjelasan alokasi dana yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Malang di atas, terlihat bahwa pengelolaan dari dana yang berhasil dihimpun cukup optimal. Penanaman dana telah dilakukan pada aktiva produktif yaitu kredit, penempatan dana pada bank lain dan dalam bentuk surat berharga (SBI), serta penanaman dana dalam aktiva tidak produktif yang terdiri atas alat likuid (kas) dan juga aktiva tetap. Bank Jatim Cabang Malang meskipun banyak mengalokasikan dananya untuk kredit, tetapi tetap memperhatikan prioritas utama yaitu likuiditas dana guna memenuhi penarikan dana oleh nasabah, dengan mencandangkan dana dalam bentuk kas tunai dan giro pada bank lain sebesar 95,324 milyar tahun 2006, 100,089 milyar tahun 2007, dan 97,782 milyar pada tahun 2008, dimana Pencadangan dalam bentuk kas tunai tersebut ditetapkan berdasarkan prakiraan rata-rata penarikan nasabah yang dihitung dari laporan keuangan bank.

C. Kredit

1. Kebijakan Kredit

Pemberian kredit mengandung tingkat risiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari maupun memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi, maka PT. Bank Jatim Cabang Malang selaku kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian atas analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan prinsip 5C.

Disamping menganalisis dengan menggunakan prinsip 5C, PT. Bank Jatim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit harus berdasarkan Undang-Undang tentang perbankan yang sedang berlaku di Indonesia.
- b. Kondisi makro ekonomi juga harus diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari, seperti tidak tertagihnya kredit atau terjadinya kredit macet.
- c. Jangka waktu pelunasan kredit harus disesuaikan dengan tingkat likuiditas calon debitur.
- d. Pelunasan kredit bukan berasal dari penjualan asset atau jaminan melainkan berasal dari proyek yang dibiayai dengan kredit.

Manajemen PT. Bank Jatim melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) memfokuskan PT. Bank Jatim sebagai *retail banking* untuk Usaha Kecil dan Menengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penyebaran risiko

Dengan jumlah debitur yang cukup besar maka sangat kecil kemungkinannya terjadi kredit macet secara keseluruhan, sedangkan kredit korporasi dengan *outstanding* yang sama tapi jumlah debeturnya sedikit memungkinkan untuk terjadinya kredit macet secara keseluruhan.

- b. Risiko kredit lebih kecil

Kredit korporasi sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, misalnya adanya krisis moneter, sedangkan sector UKM tidak begitu terpengaruh terhadap pengaruh tersebut.

- c. Penyelesaian kredit lebih mudah

Penanganan kredit korporasi yang bermasalah lebih sulit dibandingkan dengan UKM karena agunan UKM relative dapat dijangkau masyarakat umum.

- d. Pengelolaan *loanable fund* lebih mudah

Plafond kreditnya yang relatif kecil mempermudah manajemen bank mengatur pendanaannya.

- e. Pertimbangan politis

Pengembangan UKM memberikan dampak politis yang lebih besar, karena dapat menyerap tenaga kerja lebih besar yang berarti secara tidak langsung, PT. Bank Jatim ikut serta dalam menciptakan pemerataan pendapatan.

2. Jenis Kredit

Dalam upaya pemanfaatan dana yang telah dihimpun dari masyarakat, maka PT. Bank Jatim menyalurkan kembali pada masyarakat melalui pemberian kredit. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembiayaan ekspansi bisnis yang prospektif, baik yang berskala kecil maupun menengah. Atau membutuhkan dana guna peningkatan kesejahteraan keluarga, PT Bank Jatim menawarkan beberapa skim perkreditan yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

1) Kredit Menengah dan Korporasi, yang terdiri dari beberapa Skim antara lain:

a) Bank Garansi

Merupakan warkat yang diterbitkan oleh Bank yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi / default)

b) Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk mebiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun

c) Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah/ panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

d) Kredit modal Kerja Pola Kepres

Adalah fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran terminj proyek yang bersangkutan.

e) Kredit Modal kerja Standbay Loan

Adalah fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor dengan Plandfond tertentu yang dapat dicairkan per proyek/ kontrak kerja, sumber pembayarannya berasal dari terminj proyek termasuk juga

membiayai pembukaan L/C dan atau SKBDN.

f) Kredit Kontruksi Properti

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek *property*.

2) Kredit Program, ada beberapa skim kredit program antara lain:

a) Kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Merupakan kredit untuk pendanaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (KUKM) dan koperasi baik untuk investasi maupun modal kerja serta meningkatkan akses kepada lembaga pembiayaan

b) Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Merupakan kredit yang bertujuan membantu permodalan bagi petani, peternak, nelayan, kelompok tani, Usaha kecil, Menengah dan Koperasi

c) Kredit Pemilikan Rumah (KPR/KPRS) Bersubsidi

Kredit yang bertujuan untuk pembelian rumah (KPR) dan kredit pembangunan / perbaikan rumah milik swadaya (KPRS) kepada Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri yang gajinya melalui Bank Jatim dengan bantuan subsidi dari pemerintah berupa subsidi uang muka

d) Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah

Sertifikasi dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah

e) Kredit dana bergulir PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) APBD Jawa Timur

Kredit ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Propinsi Jawa Timur terhadap tenaga kerja dari Jawa Timur yang akan bekerja ke luar negeri melalui PJTKI. Bank Jatim ditunjuk sebagai penyaluran dana APBD Propinsi Jawa Timur

f) Kredit Dana Bergulir UKMK (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi) APBD Propinsi Jawa Timur

Merupakan wujud kepedulian pemerintah Profinsi Jawa Timur kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi di Jawa Timur, di mana

pelaksananya kerjasama dengan Bank Jatim dan BPR Jatim sebagai bank pelaksana

g) Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3)

Merupakan kredit yang bertujuan untuk membantu permohonan bagi para petani, peternak, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Pengusaha Mikro-kecil pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dari hulu sampai hilir.

3) Kredit Mikro dan Kecil, dimana kredit ini memiliki beberapa skim antara lain:

a) Kredit Pundi Kencana (Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri Kepada yang Cekatan Berusaha dan Menabung)

Kredit diberikan kepada pengusaha mikro secara perorangan agar mampu mengembangkan usahanya, di samping itu dapat disalurkan dalam bentuk kerjasama nasabah binaan dengan MOU dari lembaga lain seperti perguruan Tinggi/ Instansi/ Lembaga Ekonomi/ BUMN/ BUMD sebagai *avalist* (penjamin)

b) Kredit SUDARA (Kredit Sistem Usaha Damai Sejahtera)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau melalui BPR, Koperasi dan LKM untuk disalurkan kepada perorangan

c) Kredit Kartu Bidan Sejahtera

Kredit yang diberikan kepada para bidan ditujukan untuk keperluan pembiayaan pelatihan/ training, Pengadaan/ pembelian kontrasepsi dan obat serta peralatan kesehatan untuk keperluan praktek bidan.

d) Kredit PAK KADES (Paket Kredit Masyarakat Desa)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro/ kecil guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau melalui BPR, Koperasi dan LKM untuk disalurkan kepada perorangan dengan pola eksekuting.

e) Kredit Multiguna

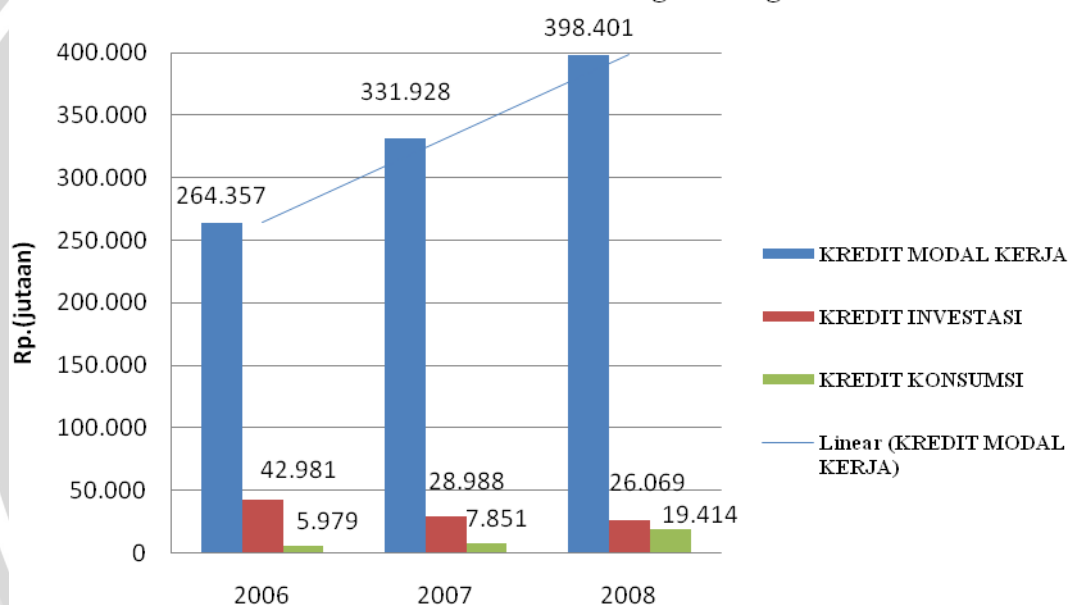
Kredit yang diberikan kepada PNS, Pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI, Anggota Legislatif, karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan yang gajinya melalui Bank Jatim.

f) Fasilitas talangan AL Mabruur

Kredit talangan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang diberikan oleh Bank Jatim kepada orang yang membutuhkan agar memperoleh porsi sebagai jamaah Haji.

Pemberian kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang didominasi pemberian kredit KMK (Kredit Modal Kerja) seperti tergambar dari diagram dibawah ini.

Gambar 8
Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
PT. Bank Jatim Cabang Malang



Tahun	2006	2007	2008
KREDIT MODAL KERJA	264.357	331.928	398.401
KREDIT INVESTASI	42.981	28.988	26.069
KREDIT KONSUMSI	5.979	7.851	19.414
	313.317	368.767	443.884

(a) Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja (KMK) pada Bank Jatim Cabang Malang dari tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatan, terlihat dari tabel 7 jumlah KMK yang disalurkan tahun 2006 adalah sebesar 264 milyar dan di tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 25,56% atau sekitar 68 milyar sehingga kredit yang

disalurkan adalah sebesar 332 milyar, sedangkan dari 2007 ke 2008 juga mengalami peningkatan sebesar 20,03% yaitu sekitar 66 milyar dan jumlah kredit yang dikururkan adalah sekitar 398 milyar. KMK dengan nominal terbesar terdapat pada KMK multiguna, kemudian KMK rekening koran (R/C umum), dimana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Kredit Modal Kerja
PT. Bank Jatim Cabang Malang

dalam jutaan rupiah kecuali persentase

	2006	2007	2008
kredit modal kerja	264.357	331.928	398.401
Peningkatan (penurunan) KMK		67.571	66.473
Prosentase		25,56%	20,03%
KMK R/C umum	3.786	5.085	13.912
Peningkatan (penurunan) KMK R/C umum		1.299	8.827
Prosentase		34,31%	174%
KMK Pola KEPRES	2.396	140	0
Peningkatan (penurunan) KMK Pola Kepres		-2.256	-140
Prosentase		-94,16%	-100%
KMK pundi kencana	1.224	2.713	5.857
Peningkatan (penurunan) KMK Pundi Kencana		1.489	3.144
Prosentase		122%	116%
KMK kredit multi guna	256.093	321.364	371.664
Peningkatan (penurunan) KMK kredit Multiguna		65.271	50.300
Prosentase		25,49%	15,65%
kredit Stand By Loan	740	1.695	6.214
Peningkatan (penurunan) kredit Stand By Loan		955	4.519
Prosentase		129%	267%
KMK Binaan Dep. Pertanian	0	750	750
Peningkatan (penurunan) KMK		750	0
Prosentase			0%
KMK-KUMK SUP	118	180	4
Peningkatan (penurunan) KMK-KUMK SUP		62	-176
Prosentase		53%	-98%

Sumber: data diolah

Dari data tersebut mulai tahun 2006-2008 penyaluran kredit terbesar kepada kredit multiguna yaitu sebesar 256 milyar ditahun 2006; 321 milyar ditahun 2007, dan sebesar 371 milyar pada tahun 2008. Alokasi yang besar untuk produk bank jatim yang satu ini dikarenakan memang tingkat keamanannya yang besar,

dimana kredit multiguna notabennya diperuntukkan kepada PNS, pegawai BUMN/BUMD, anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan yang gajinya melalui Bank Jatim. Selain itu sasaran kredit multiguna sendiri adalah seluruh sektor ekonomi produktif, hal ini sejalan dengan fungsi KMK yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha para debitur. Terbesar kedua adalah penyaluran KMK untuk kredit rekening koran (R/C umum), dimana pada tahun 2006 nominal untuk kredit ini adalah sebesar 3,8 milyar dan meningkat sebesar 34,31% menjadi 5 milyar ditahun 2007, dan melonjak drastis sebesar 174% yaitu sebesar 13 milyar di tahun 2008.

Penyaluran KMK dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat seperti pada kredit pundi kencana dan kredit *stand by loan*, dimana kedua jenis kredit ini peningkatannya sama-sama melebihi 100% untuk tiap tahunnya. Untuk kredit pundi kencana sasaran sektor usaha yang dibiayai adalah perdagangan, industri, pertanian, jasa, atau dapat dikatakan meliputi semua sektor usaha produktif, sedangkan untuk kredit *stand by loan* dikhususkan untuk pembiayaan proyek. Kecenderungan peningkatan pada dua jenis kredit ini ternyata tidak terjadi untuk Penyaluran KMK pada kredit Pola KEPRES dan kredit KUMK-SUP, dimana untuk kredit pola KEPRES di tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 94,16% yaitu dari 2,4 milyar ditahun 2006 menjadi 140 juta ditahun 2007, dan untuk tahun 2008 tidak ada penyaluran untuk jenis kredit ini. Sedangkan untuk KUMK-SUP dari 2006 ke 2007 masih mengalami peningkatan sebesar 53% tetapi menurun drastis sebesar 98% di tahun 2008. Penyaluran KMK yang stabil yaitu pada kredit binaan, meskipun nominalnya kecil tetapi jumlah yang disalurkan untuk tahun berikutnya tetap sama yaitu sebesar 750 juta.

(b) Kredit Investasi

Pemberian kredit terbesar kedua setelah kredit modal kerja adalah kredit investasi dimana penyalurannya yaitu pada jenis kredit investasi umum; kredit investasi pundi kencana; kredit investasi multiguna; kredit investasi ketahanan pangan; kredit investasi binaan, dan kredit investasi KUMK SUP. Berbeda dengan kredit modal kerja yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kredit investasi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2006-2007 padahal secara keseluruhan pemberian kredit pada bank Jatim Cabang Malang juga

mengalami peningkatan. Seperti tampak pada tabel 8, jumlah kredit investasi adalah sebesar 42,98 milyar tahun 2006; 28,99 milyar tahun 2007 dan sebesar 26,1 milyar tahun 2008. Penurunan sebesar 32,56% terjadi ditahun 2007 dan 10,07% pada tahun 2008.

Tabel 8
Kredit Investasi
PT. Bank Jatim Cabang Malang

dalam jutaan rupiah kecuali persentase

	2006	2007	2008
Kredit Investasi	42.981	28.988	26.069
Peningkatan (penurunan) KI		-13.993	-2.919
Prosentase		-32,56%	-10,07%
KI umum	18.374	8.233	3.513
Peningkatan (penurunan) KI Umum		-10.141	-4.720
Prosentase		-55,19%	-57,33%
KI Pundi Kencana	733	1.318	5.643
Peningkatan (penurunan) KI Pundi Kencana		585	4.325
Prosentase		79,81%	328,15%
KI Multiguna	21.462	15.660	11.111
Peningkatan (penurunan) KI Multiguna		-5.802	-4.549
Prosentase		-27,03%	-29,05%
KI Ketahanan pangan	0	0	467
Peningkatan (penurunan) KI Ketahanan Pangan		0	467
Prosentase			
KI Binaan Dep. Pertanian	0	400	283
Peningkatan (penurunan) KI Dep. Pertanian		400	-117
Prosentase			-29%
KI-KUMK SUP	2.412	3.377	5.052
Peningkatan (penurunan) KI-KUMK SUP		965	1.675
Prosentase		40,01%	50 %

Sumber: data diolah

Dari keseluruhan kredit investasi, Bank jatim banyak menempatkan dananya untuk kredit investasi multiguna, di mana tahun 2006 nominal KI multiguna sebesar 21,46 milyar menurun sebesar 27,03% pada tahun 2007 yaitu menjadi 15,66 milyar dan tahun 2008 juga mengalami penurunan sebesar 29,05% menjadi sebesar 11,11 milyar rupiah. Penurunan ini wajar terjadi karena secara keseluruhan kredit investasi memang mengalami penurunan. KI yang cukup tinggi

berikutnya adalah KI umum dimana dari tahun 2006 ke 2008 juga mengalami penurunan yaitu 55,19% pada tahun 2007 dan 57,33% pada tahun 2008. Kecenderungan penurunan ini ternyata tidak terjadi pada KI Pundi Kencana yang ternyata meningkat sebesar 79,81% yaitu dari 733 juta ditahun 2006 menjadi 1,32 milyar ditahun 2007 dan melonjak lebih tinggi sebesar 328,15% di tahun 2008 yaitu sebesar 5,6 milyar rupiah. Selain KI pundi kencana yang mengalami peningkatan KI KUMK SUP juga demikian, awalnya ditahun 2006 hanya 2,4 milyar yang disalurkan kemudian meningkat menjadi 3,3 milyar ditahun 2007 atau mengalami peningkatan sebesar 40,01% dan pada tahun 2008 meningkat lagi hingga 50% menjadi sebesar 5 milyar rupiah.

Berbeda dengan kondisi di atas untuk KI binaan, baru dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Malang pada tahun 2007 yaitu sebesar 400 juta dan mengalami penurunan sebesar 29% atau sekitar 117 juta sehingga hanya menjadi 283 juta pada tahun 2008. Untuk kredit KUMK SUP juga baru dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Malang di tahun 2008 yaitu sebesar 467 juta, sehingga perkembangannya belum begitu dapat dinilai.

(c) Kredit Konsumsi

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bagian internal bank, kredit konsumsi ditujukan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit jenis ini banyak diberikan kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, seperti yang terlihat dari tabel 9, yang mana kredit konsumsi mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 didominasi oleh kredit pegawai bank jatim sendiri yaitu sebesar 4,72 milyar tahun 2006; meningkat 10,53% menjadi 5,22 milyar tahun 2007, dan 6,75 milyar di tahun 2008 atau meningkat sebanyak 29,3%. Selain didominasi oleh kredit pegawai bank jatim, kredit konsumsi juga didominasi oleh kredit Al-Mabrur yaitu kredit talangan untuk pembayaran biaya pelaksanaan ibadah haji, dimana besarnya kredit ini adalah 1,08 milyar tahun 2006; 2,51 milyar tahun 2007, dan sebesar 9,92 milyar ditahun 2008.

Kredit konsumsi tentunya tidak lepas juga dari kredit pemilikan rumah (KPR), pada tabel 9 terlihat bahwa pada tahun 2007 nilai KPR mengalami

penurunan sebesar 32,61% yang mana pada tahun 2006 nilai kreditnya 138 juta menjadi 93 juta pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat tinggi hingga mencapai 2.512% yaitu senilai 2,43 milyar rupiah. Kredit konsumsi yang lainnya yaitu jenis kredit multiguna sebesar 12 juta pada tahun 2006 dan 13 juta pada tahun 2007, sedangkan untuk kredit pegawai negeri dan kredit konsumsi sertifikat tanah hanya ada di tahun 2006 yang mana masing-masing senilai 3 juta dan 28 juta, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun berikutnya.

Tabel 9
Kredit Konsumsi
PT. Bank Jatim Cabang Malang

dalam jutaan rupiah kecuali persentase

	2006	2007	2008
kredit konsumsi	5.979	7.851	19.414
Peningkatan (penurunan) Kredit konsumsi		1.872	11.563
Prosentase		31,30%	147%
kredit pemilikan rumah	138	93	2.429
Peningkatan (penurunan) Kred.pemilikan rumah		-45	2.336
Prosentase		-32,61%	2.512%
kredit pegawai bank jatim	4.722	5.219	6.748
Peningkatan (penurunan) Kred. Pegawai B.Jatim		497	1.529
Prosentase		10,53%	29,30%
kredit pegawai negeri (KPN)	3	0	0
Peningkatan (penurunan) KPN		-3	0
Prosentase		-100%	0
Kredit Multiguna	12	13	0
Peningkatan (penurunan) Kred. Multiguna		1	-13
Prosentase		8,33%	-100%
kredit AL. Maburr	1.076	2.511	9.920
Peningkatan (penurunan) Kred.AL-Maburr		1.435	7.409
Prosentase		133%	295%
kred. Kons. Sertifikat Tanah	28	0	0
Peningkatan (penurunan) Kred.Kons.Sertifikat Tnh		-28	0
Prosentase		-100%	0
lainnya	0	15	317
Peningkatan (penurunan) lainnya		15	302
Prosentase			2.013%

Sumber: data diolah

3. Analisis Jenis Kredit

Dari berbagai jenis kredit menurut penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang mendominasi dalam usaha PT. Bank Jatim Cabang Malang. Untuk KMK terbesar disalurkan pada jenis kredit multiguna. Alokasi yang besar untuk produk bank jatim yang satu ini dikarenakan memang tingkat keamanannya yang besar, dimana kredit multiguna notabennya diperuntukkan kepada PNS, pegawai BUMN/BUMD, anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan yang gajinya melalui Bank Jatim, sehingga proses monitoring untuk kredit ini relatif muda dimana kemungkinan tidak tertagihnya kredit dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu sasaran kredit multiguna sendiri adalah seluruh sektor ekonomi produktif, hal ini sejalan dengan fungsi KMK yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha para debitur.

Jenis penyaluran KMK lainnya yang juga mengalami peningkatan dari tahun-ke tahunnya adalah KMK R/C umum, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan yang lain. Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dalam jumlah sebagian-sebagian atau seluruh plafond yang tersedia, sesuai kebutuhan dan setiap waktu pula dapat menyetorkan kembali ke dalam rekening tersebut. Jenis kredit ini meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan keuntungan dari kredit ini, bagi debitur adalah karena terhadap penyediaan dana yang tidak digunakan biasanya tidak dikenakan bunga (atau walaupun dikenakan, bunganya kecil sekali). Dengan demikian penggunaan kredit dapat benar-benar dilakukan secara efisien sesuai dengan keperluannya. Sedangkan keuntungan bagi bank antara lain dapat mengontrol dan menilai perputaran keuangan debitur, khusus pada rekening kreditnya.

Sama hanya dengan KMK R/C umum, KMK pundi kencana dan *Stand by loan* juga mengalami peningkatan. Yang jauh berbeda di sini adalah KMK pola Kepres dimana, dari tahun 2006 ke 2007 turun hingga 95%, dan pada tahun 2008 sama sekali tidak. Tetapi fasilitas KMK untuk pembiayaan proyek masih dapat didukung oleh KMK *Stand by loan*.

Berbeda dengan kredit modal kerja yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kredit investasi malah mengalami penurunan dari tahun 2006-2008, padahal secara keseluruhan pemberian kredit pada bank Jatim Cabang Malang mengalami peningkatan. Mengingat KI adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Hal itulah yang membuat KI cenderung memiliki resiko kredit yang cukup tinggi. Di sini pihak bank akan sulit membuat perkiraan yang akurat dari hasil usahanya, dan pemberian kredit ini didasarkan kepada pengalaman usaha serupa. Maka dari itu pemberian kredit investasi jumlahnya masih jauh di bawah kredit modal kerja, di mana bank cenderung tidak banyak meloloskan permohonan kredit jenis ini karena tingkat keamanannya dan karena bank tidak mau melakukan spekulasi yang terlalu besar. Nominal terbesar untuk kredit investasi (KI) ada pada KI multiguna, setelah itu KI umum dan selanjutnya adalah KI pundi kencana. Tingginya KI multiguna dikarenakan sifat dari kredit multiguna itu sendiri yaitu pemberian kredit untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui Bank Jatim dan atau telah mendapat persetujuan kantor pusat, sehingga resiko kredit macet yang dapat ditimbulkan oleh kredit ini sangat minim karena tingginya kontrol dari pihak bank.

Pemberian kredit yang terakhir yaitu kredit konsumsi. Kredit ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Volume kredit konsumsi cenderung kecil, sangat jauh bila dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit investasi. Hal ini disebabkan karena kredit konsumsi bukan merupakan jenis kredit produktif sehingga cenderung beresiko karena pembayarannya hanya mengandalkan pendapatan debitur. Kredit ini banyak disalurkan dalam bentuk kredit pegawai yang diperuntukkan untuk pegawai Bank Jatim sendiri, setelah itu kredit Al.Mabrur yaitu kredit talangan untuk pembayaran biaya pelaksanaan ibadah haji, kemudian kredit pemilikan rumah (KPR).

Pada dasarnya pemberian kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang telah

mencakup Banyak sektor, tetapi pertumbuhan dan perkembangan kredit yang ada pada bank jatim hanya didominasi oleh produk kredit tertentu saja dengan nominal yang sangat tinggi, sedangkan yang lain berada jauh di bawahnya. Bisa kita lihat untuk angka nominal KMK multiguna yang sangat tinggi yaitu sekitar 265 milyar tahun 2006; 321 milyar tahun 2007 dan sebesar 372 milyar tahun 2008. Angka tersebut mendominasi lebih dari 85% dari total kredit yang disalurkan, dimana kredit yang disalurkan tahun 2006 sekitar 313 milyar, pada 2007 sebesar 369 milyar dan tahun 2008 sebesar 444 milyar. Ketimpangan inilah yang harus diperbaiki oleh Bank Jatim Cabang Malang, jangan hanya memberatkan satu sektor saja padahal sektor yang lain memiliki potensi yang besar yang dapat memberikan income yang besar pula pada bank. Bagian kredit PT. Bank Jatim harus benar-benar melakukan evaluasi yang matang terhadap semua jenis kredit yang ada, mempertahankan yang telah baik, dan meningkatkan jenis kredit lainnya yang selama ini mungkin kurang populer dikalangan masyarakat, sehingga penyaluran kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat lebih ditingkatkan.

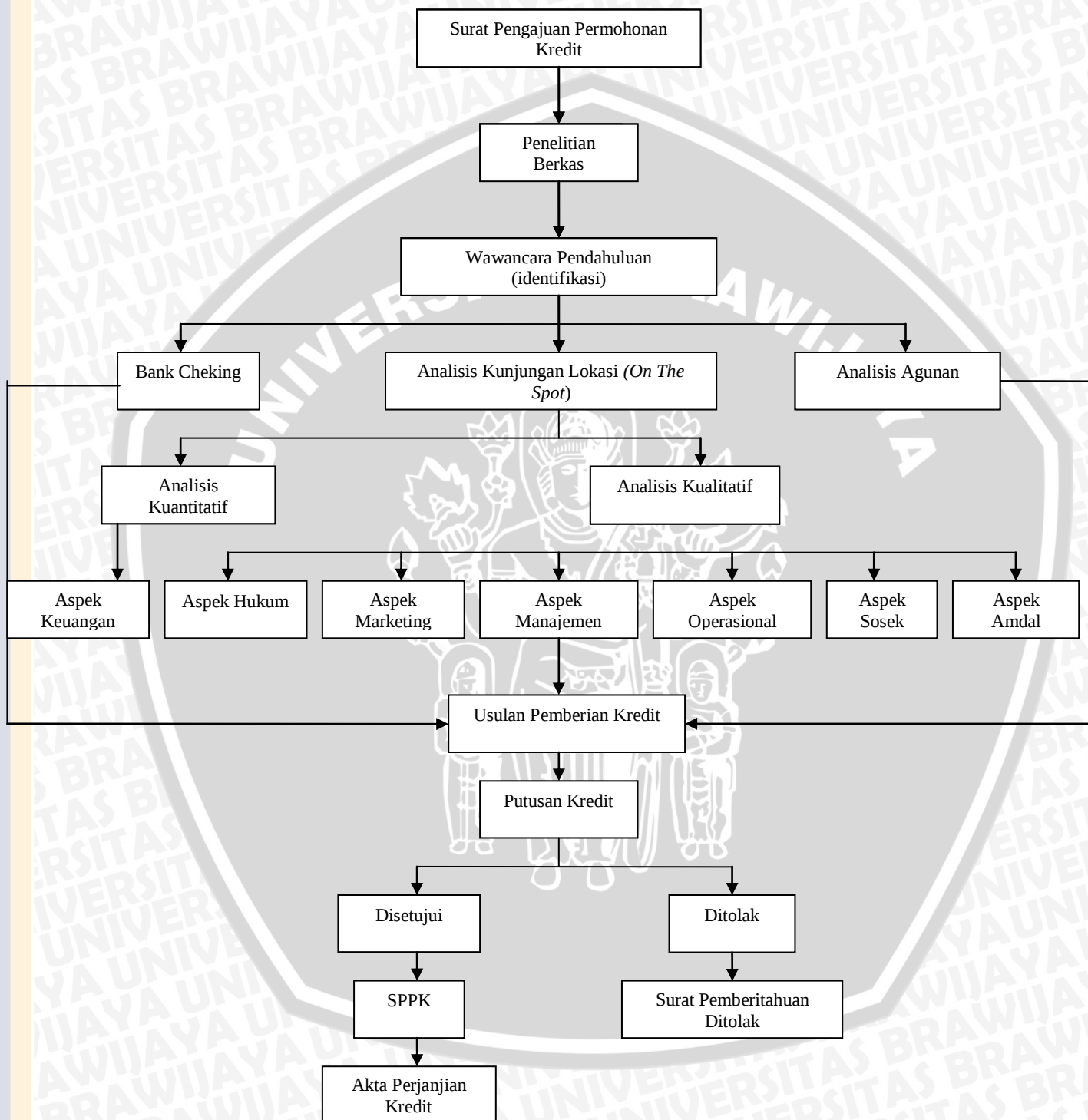
4. Sistem Pemberian Kredit

Proses pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahapan pencairan kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat digambarkan pada gambar 9.

Dari gambar proses pengajuan permohonan kredit tersebut diatas, dapat dijelaskan proses permohonan kredit sampai dengan tahap pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

- 1 Pengajuan dan Persetujuan Kredit
 - a. Pada tahap awal, pihak pemohon kredit atau calon debitur mengajukan surat pengajuan permohonan kredit secara tertulis kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Jatim Seksi Pemasaran dan KKP. Surat permohonan kredit harus dilengkapi dengan:
 - 1) Legalitas pemohon, antara lain:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Gambar 9
Proses Pengajuan Permohonan Kredit
PT. Bank Jatim Cabang Malang



Sumber : Bank Jatim Cabang Malang (2009)

- (2) Kartu Keluarga (KK)
- (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (4) Pas photo
- 2) Legalitas Usaha, antara lain:
 - (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - (2) Surat Ijin Usaha jasa Kontruksi (SIUJK)
 - (3) Surat ijin Tempat Usaha (SITU)
 - (4) Akta Pendirian Badan Usaha
 - (5) Pengesahan Badan Hukum
- 3) Legalitas Agunan, antara lain:
 - (1) Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
 - (3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 4) Proposal singkat.
- 5) Struktur Organisasi.
- 6) Laporan Keuangan dua tahun terakhir.
- 7) Rencana pinjaman dana, rencana penggunaan dana serta rencana pengembalian dana.

Administrasi kredit memeriksa kelengkapan dokumen serta melakukan identitas yang berupa:

1) Identitas Berkas

Jika surat permohonan kredit beserta persyaratannya sudah lengkap dan benar maka Administrasi Kredit akan mencocokkan salinan berkas tersebut dengan aslinya kemudian menstempel dan menandatangani.

2) Identitas dan Informasi perbankan (*bank checking*)

Administrasi Kredit memeriksa tentang kredibilitas calon debitur, misalnya apakah calon debitur terlibat kredit macet atau masuk daftar hitam Bank Indonesia.

- a. *Accout Officer* menerima berkas calon debitur dari Administrasi Kredit untuk kemudian dilakukan wawancara pendahuluan dengan calon debitur.
- b. Analisis kunjungan Lokasi (*On the Spot*)

Untuk mengevaluasi usaha dari beberapa aspek pemeriksaan dan penilaian

kredit. Tujuan dari pemeriksaan dan penilaian kredit adalah memastikan dalam artian apakah calon debitur mempunyai usaha yang memerlukan pembiayaan dari kredit, seberapa pentingkah calon debitur ini mengajukan usulan permohonan kredit. Beberapa aspek pemeriksaan dari penilaian kredit yang dilaksanakan oleh Analisis Kredit antara lain:

1) Analisis Kuantitatif

a) Aspek Keuangan

Tujuan dalam mengadakan analisis aspek keuangan ini antara lain untuk memenuhi struktur kebutuhan permodalan calon debitur yang akan disesuaikan dengan struktur perkreditan yang tersedia di pihak bank, posisi keuangan calon debitur mencakup informasi rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas serta prospek posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk dapat mengetahui berbagai informasi yang diharapkan tersebut maka para Analisis Kredit memerlukan laporan neraca dan laporan rugi laba dua periode terakhir. Dari evaluasi aspek keuangan ini akan muncul beberapa teknik analisis, antara lain analisis *common size* dan analisis rasio.

2) Analisis Kualitatif

a) Aspek Hukum

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis pada aspek ini, antara lain meliputi:

(1) Legalitas pemohon kredit dan legalitas badan usaha harus jelas, sedangkan untuk perorangan atau pribadi harus dipastikan orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang harus dibuktikan dengan KK dan KTP.

(2) Legalitas operasional atau perijinan, harus data dipastikan bahwa calon debitur baik perusahaan perorangan maupun bersama memiliki ijin usaha yang jelas dan tidak bertentangan dengan hokum dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.

(3) Legalitas proyek, usaha yang dijalankan calon debitur harus didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah atau swasta.

b) Aspek Pemasaran

Analisis mengenai kemampuan untuk memasarkan produk atau jasa perusahaan saat ini dan yang akan datang, posisi persaingan dengan perusahaan sejenis, yang meliputi saluran distribusi, syarat penjualan, realisasi penjualan dibandingkan dengan targetnya, luas atau daerah pemasaran dan persaingan strategi pemasaran atau promosi.

c) Aspek Manajemen

Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila si pengelola proyek tersebut mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai. Pengertian kuantitas tidak hanya terbatas pada persoalan keahlian, pengalaman serta pendidikan, tetapi juga tergantung pada karakter atau integritas dalam mengelola suatu proyek.

d) Teknik Operasional

Analisis mengenai teknis dan produksi (untuk perusahaan manufaktur) dan pembelian (untuk perusahaan dagang), meliputi:

(1) Perusahaan Manufaktur

Kondisi mesin-mesin atau peralatan lain, proses produksi, realisasi produk dibandingkan dengan targetnya, rencana produksi yang akan datang, pemasok bahan baku yang dominan serta cara pembelian bahan baku.

e) Aspek Sosial Ekonomi

Analisis pada aspek ini ada dasarnya bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki *value added* yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makro ekonomis, terutama dilihat dari pandangan pemerintah dan pihak masyarakat, seperti kesempatan kerja, penerimaan devisa, penghematan devisa, penggunaan bahan baku lokal, pendapatan negara dari segi pajak, kelestarian alam, dan lain sebagainya.

f) Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis ini berkaitan dengan perusahaan atau industri besar. Analisis ini mempunyai standar analisa yang cukup tinggi terutama terhadap pemeliharaan lingkungan dan kemungkinan pencemaran lingkungan.

c. Analisis Jaminan Tambahan atau Agunan

Agunan yang diterima oleh PT. Bank Jatim adalah agunan yang mampu diikat secara yuridis oleh Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Adapun syarat-syarat agunan perkreditan terdiri dari:

1) Syarat Ekonomis

Dapat diperjual belikan, nilai agunan harus konstan, mempunyai nilai manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang relatif lama.

2) Syarat Yuridis

Agunan tidak sedang dalam persengketaan, memiliki bukti-bukti kepemilikan agunan atau sertifikat atas nama calon debitur yang bersangkutan.

d. Ketika tiba di kantor PT. Bank Jatim kembali setelah melakukan analisis kunjungan lokasi, semua hasil analisis yang dilaksanakan oleh Analisis Kredit baik secara kuantitatif diperiksa dan dipelajari kembali serta dilakukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut untuk menentukan tingkat kelayakan pemohon kredit tersebut beserta jumlah plafondnya. Hasil dari analisis ini dibuat dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah yang disertai dengan rekomendasi tentang persetujuan atau penolakan kredit.

e. Hasil pembahasan yaitu laporan kunjungan nasabah dibawa ke Komite Kredit yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Program (KKP), Internal Control dan Para Dewan Direksi dari kantor pusat jika diperlukan.

f. Komite Kredit akan memberikan evaluasi-evaluasi atas sejumlah catatan-catatan yang dilakukan oleh Analisis Kredit.

g. Komite kredit memberikan rekomendasi pemberian atau penolakan pemohon kredit.

h. Apabila pemohon kredit itu ditolak maka segera dibuat surat pemberitahuan penolakan kredit. Sedangkan jika pemohon kredit mendapatkan persetujuan maka segera dikeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK). Dalam

SPPK ini memuat dan mengatur tentang struktur kreditnya (plafond, tingkat suku bunga dan jangka waktu kredit), syarat penandatanganan kredit, jaminan agunan yang dilakukan serta tata cara atau mekanisme pembayaran kembali kredit serta sanksi-sanksi jika pihak calon debitur melakukan wan prestasi. SPPK ini di otorisasi oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Pemasaran dan KKP yang dibuat rangkap dua yang masing-masing untuk debitur dan untuk arsip pihak bank

- i. SPPK ini kemudian dikirim kepada calon debitur untuk diperiksa. Apabila calon debitur telah setuju dengan isi SPPK maka calon debitur dapat menandatangani kemudian mengirim kembali SPPK tersebut kepada bank.
- j. Seksi Administrasi Kredit menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian kredit, kemudian dilimpahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat rangkap dua kemudian ditandatangani oleh pihak bank dan calon debitur di depan notaris. Akta perjanjian Kredit ini mencantumkan pihak-pihak secara jelas berdasarkan kedudukan masing-masing serta hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan isi SPPK.
- k. Setelah akta perjanjian kredit dibuat kemudian diadakan pengikatan agunan. Pengikatan agunan ini dibuat rangkap dua yaitu untuk debitur dan untuk arsip pihak bank.
- l. Jangka waktu permohonan kredit sampai dengan realisasi kredit dilakukan adalah kurang lebih selama satu minggu sejak permohonan kredit diterima oleh Administrasi Kredit.
- m. Pengawasan pelaksanaan pemberian kredit secara khusus dilakukan oleh Penyelia Pemasaran dan KKP. Di samping itu juga dilakukan pengawasan secara umum oleh bagian *Internal Control*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan kredit.

Pengambilan keputusan atas suatu permohonan kredit harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan analisis secara sistematis dan terarah serta dengan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit dalam rangka menjamin tingkat keamanan dan pertimbangan

profitability bagi pihak lain. Faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Legalitas calon debitur dan legalitas operasional, meliputi:
 - 1) Identitas dan riwayat hidup calon debitur.
 - 2) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - 3) Mempunyai ijin badan usaha yang jelas dilengkapi dengan akta pendirian serta surat-surat ijin lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- b. Tujuan penggunaan permohonan kredit dan jumlah dana yang dibutuhkan.
- c. Penilaian permohonan kredit dengan prinsip 5C, meliputi penilaian tetang:
 - 1) *Character* (karakter)
Penilaian mengenai karakter atau sifat yang dapat diketahui dari informasi *supplier* atau warga sekitar.
 - 2) *Capacity* (kapasitas)
Kapasitas maksimal produksi yang dapat dicapai serta kemampuan mengelola usahanya.
 - 3) *Capital*
Penilaian terhadap aspek keuangan, meliputi *cash flow*, pemenuhan kewajiban *financial*, likuiditas, rentabilitas dan sebagainya.
 - 4) *Collateral* (jaminan atau agunan yang diberikan)
Apakah agunan yang akan dijaminakan *marketable*, serta apakah nilainya lebih besar dari jumlah kredit yang diminta.
 - 5) *Condition of Economy*
Merupakan penilaian yang dilakukan mengenai kemungkinan adanya dampak negatif akibat adanya peraturan baru, perubahan politik, perkembangan usaha atau ekonomi baik secara regional, nasional maupun internasional.

2. Pencairan Kredit

- 1) Setelah Akta Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan telah disetujui oleh kedua belah pihak (pihak calon debitur dan pihak bank yang diwakili oleh pimpinan cabang dan Penyelia Pemasaran dan KKP) maka Administrasi Kredit kemudian melakukan *over booking* atau melakukan pemindah bukuan jumlah plafond kredit ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan.

- 2) Debitur dapat mengambil dananya langsung ke teller. Dana kredit di ambil secara bertahap, sesuai dengan perjanjian yaitu dengan melalui cek, BG dan tunai, sesuai plafond kredit yang dimiliki dalam rekening tersebut.

3. Pembayaran Kembali Kredit

- 1) Setelah debitur menerima dana kredit yang diajukan maka debitur tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman kembali pinjamannya sesuai dengan cara pembayaran dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Dalam proses pembayaran kembali kreditnya, PT. Bank Jatim mengklasifikasikan debiturnya pada beberapa tingkat kolektibilitas. Tingkat kolektibilitas ini berdasarkan pada dua analisis yaitu:

a) Kuantitatif

- (1) Kolektibilitas 1 dikategorikan lancar, yaitu untuk debitur yang tidak pernah menunggak pembayarannya.
- (2) Kolektibilitas 2 dikategorikan dalam perhatian khusus, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayarannya selama satu sampai 90 hari.
- (3) Kolektibilitas 3 dikategorikan kurang lancar, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayaran selama 91 sampai 120 hari.
- (4) Kolektibilitas 4 dikategorikan diragukan, yaitu debitur yang menunggak pembayaran selama 121 sampai 180 hari.
- (5) Kolektibilitas 5 dikategorikan macet, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayaran selama lebih dari 180 hari atau pun debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

b) Kualitatif

Merupakan analisis yang dilakukan kepada debitur yang masuk dalam kategori kolektibilitas 1 sampai 5. Analisis ini dilakukan untuk mencari informasi tentang sebab-sebab debitur melakukan penunggakan pembayaran. Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

- (1) Itikad tidak baik (karakter) dari debitur.
- (2) *Mis management*, artinya ada kesalahan dari perusahaan debitur dalam mengelola manajemen usahanya.
- (3) *Force Major*, misalnya bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya.

- (4) Kesulitan pemasaran.
- (5) Penyalahgunaan kredit.
- (6) Pailit

2) Untuk mengatasi adanya penunggakan pembayaran kredit maka PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat melakukan beberapa tindakan yaitu:

a) Kompromi dan kooperatif

(1) Pengangsuran bertahap

Debitur diberi kesempatan untuk melunasi kreditnya dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah ditetapkan.

(2) Retrukturisasi kredit

(a) *Rescheduling*

Kebijakan yang diambil berupa mengubah atau memperpanjang jangka waktu kredit tetapi jenis kreditnya tetap. Hal ini dilakukan jika debitur masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kreditnya tetapi ada hal-hal tertentu yang membuatnya belum dapat membayar angsuran kreditnya.

(b) *Recondisioning*

Kebijakan yang diambil berupa mengubah atau memperpanjang jangka waktu kredit serta mengubah jenis kreditnya. Hal ini dilakukan jika debitur mengalami kesulitan pembayaran karena adanya kesalahan dalam menggunakan dana kredit yang diberikan.

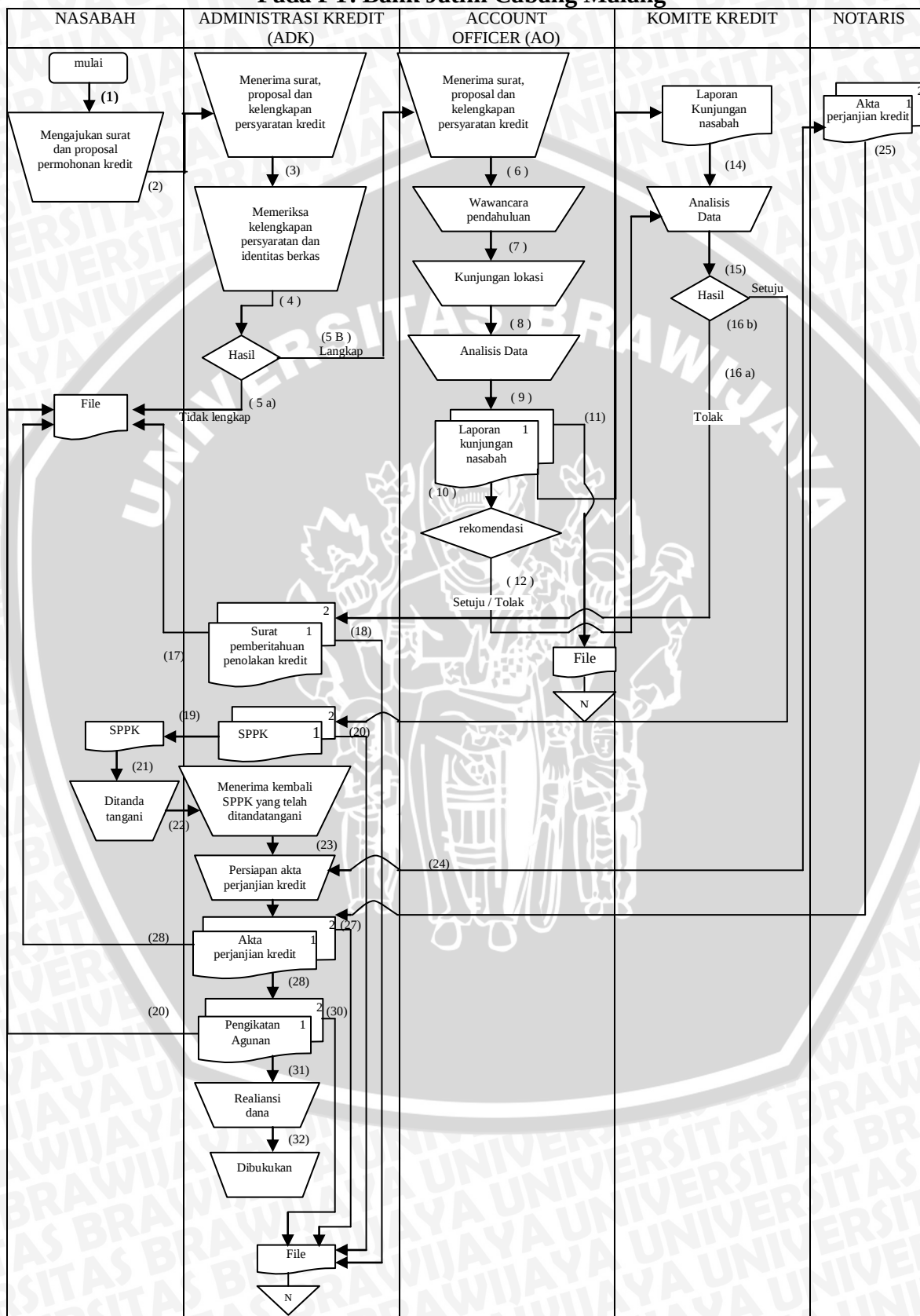
(c) Kombinasi dari *rescheduling* dan *recondisioning*

b) Lelang

Penyerahan hak tanggungan agunan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk dilakukan pelelangan atas agunan dalam rangka melunasi semua hutang atau kreditnya. Jika hasil pelelangan ini tidak cukup maka dapat dilakukan penyitaan atas harta milik pribadi debitur dengan melibatkan aparat.

Sistem pemberian kredit pada PT. Bank Jatim secara umum mulai awal sampai kepada pencairan beserta bagian yang menanganinya dapat digambarkan seperti gambar 10.

Gambar 10
Sistem Pemberian Kredit
Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang



Sumber: PT. Bank Jatim Cabang Malang 2009

Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, posisi-posisi jabatan yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. struktur ini juga mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi antar satuan kerja.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Jatim Cabang Malang adalah struktur organisasi garis (lini). Dalam sistem organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas sebagai jalur pelaporan tanggung jawab, sedangkan ke bawah adalah sebagai jalur pendelegasian tugas dan wewenang. Bentuk struktur organisasi PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat dilihat pada gambar 11.

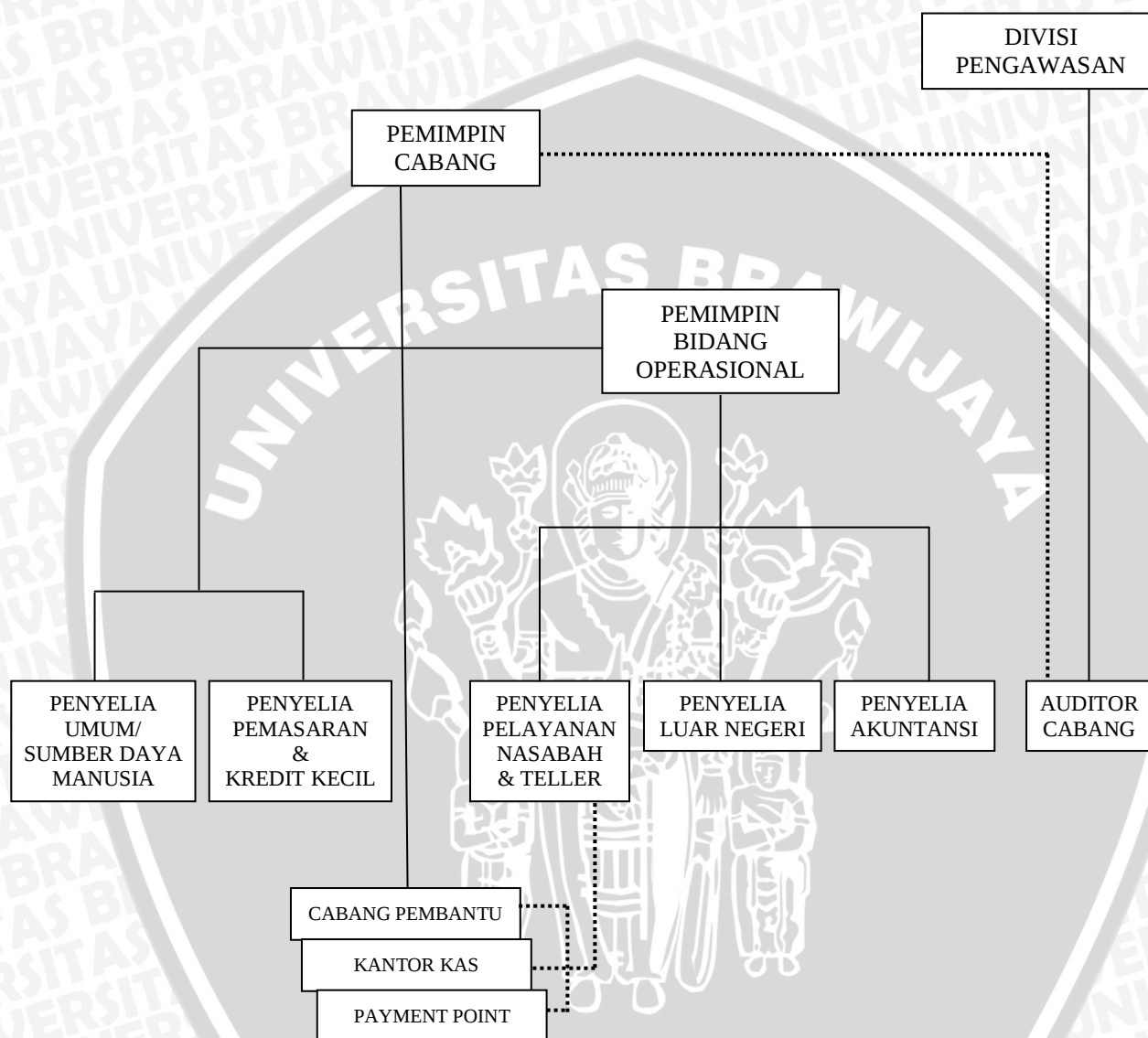
Deskripsi tugas dari masing-masing bagian yang ada pada PT. Bank Jatim Cabang Malang adalah sebagai berikut:

1) Pimpinan Cabang

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Membawahi Wakil Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Pembantu, Auditor Intern dan Penyelia *Payment Point*.
- b) Memanfaatkan, mengatur dan membina personil yang berbeda di bawah wewenangnya untuk mencapai produktifitas kerja yang tinggi.
- c) Memberikan petunjuk dan keterangan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d) Sebagai staf dari Direksi dalam hal usaha-usaha perbaikan dan penempatan serta peningkatan usaha-usaha operasional baik mengenai sistem dan prosedurnya maupun tata laksana pengelolaan bank.
- e) Memberikan secara berkala pada Direksi mengenai keadaan, perkembangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh cabang yang dipimpinnya.
- f) Setiap laporan yang diterima dari bawahan diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau kepada bawahannya.
- g) Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan Pimpinan Cabang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.

Gambar 11
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR



Sumber: PT. Bank. Jatim Cabang Malang, 2009

2) Wakil Pimpinan Cabang

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Membawahi Penyelia Teller, Penyelia Akuntansi, Penyelia Umum (Sumber Daya Manusia), Penyelia Pelayanan Nasabah, Penyelia Pemasaran dan Penyelia Kredit Kecil dan Program (KKP), dan Penyelia Luar Negeri (untuk cabang yang sudah berstatus sebagai Bank Devisa).
- b) Membantu Pimpinan Cabang dalam Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas intern cabang.
- c) Memimpin dan membawahi penyelia-penyelia dalam bidangnya.
- d) Mewakili Pimpinan Cabang dalam hal Pimpinan Cabang berhalangan sesuai dengan petunjuk direksi.
- e) Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan wakil pimpinan cabang bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang.

3) Auditor Intern

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (Penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.
- b) Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- c) Melayani tugas pemeriksa atau pengawas baik dari pihak intern maupun dari ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
- d) Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

4) Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Program (KKP)

- a) Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang Cabang serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b) Menganalisis permohonan Bank Garansi diluar penawaran dan Full cover dengan jumlah plafond sesuai wewenangnya.

- c) Melakukan penelitian, penilaian dan analisis terhadap permohonan kredit umum, kredit program dan kredit yang bersifat konsumtif.
 - d) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat.
 - e) Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit-kredit yang telah direalisasikan.
 - f) Menyelenggarakan administrasi debitur.
 - g) Menangani penyelesaian kredit dan mengupayakan langkah-langkah penyelamatan jika kredit tersebut berindikasi macet.
 - h) Memantau aktifitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah.
 - i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan melaksanakan perhitungan dan laporan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai wewenang.
 - j) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewangannya.
 - k) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut diatas Penyelia membawahi beberapa *Account Officer* dan Administrasi Kredit.
- 5) Penyelia Luar Negeri
- Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:
- a) Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi-transaksi ekspor import dan usaha valuta asing.
 - b) Mengadakan kerjasama dengan Bank Koresponden.
 - c) Melaksanakan semua kegiatan dibidang luar negeri dan valuta asing.
 - d) Mengadakan pengamatan posisi Valuta Asing Bank dan mutasi rekening Valuta Asing.
 - e) Membuat laporan-laporan ke Bank Indonesia.
 - f) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan diunit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan

dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- g) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- h) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

6) *Penyelia Teller*

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- b) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan.
- c) Mengambil dan menyetor uang kas ke Bank Indonesia atau Bank lainnya untuk keperluan persediaan uang kas.
- d) Membuat laporan keadaan uang kas.
- e) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- f) Menyelenggarakan kegiatan Kantor Kas, Kas keliling atau Kas mobil dan penyiapan uang Kas.
- g) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

7) *Penyelia Akuntansi*

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi.
- b) Membuat bukti-bukti pembukuan
- c) Membuat neraca rugi/laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
- d) Mengadakan analisis dan laporan keuangan cabang.
- e) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegunaan diunit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- f) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

8) Penyelia Umum atau Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lainnya yang sejenis sepanjang tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang.
- b) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan atau pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
- c) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung jawaban setiap bulannya.
- d) Mengelola barang-barang persediaan dari inventaris.
- e) Menyelenggarakan dan mengusahakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegunaan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- g) Melaksanakan tugas dan pelaksanaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

9) Penyelia Pelayanan Nasabah

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menjelaskan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan produk dan jasa bank.
- b) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- c) Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan atau prima agar hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan melalui program layanan prima.

- d) Melaksanakan pelayanan permohonan referensi Bank, Bank Garansi dan khusus untuk penawaran layanan prima.
- e) Melaksanakan agenda administrasi operasi bidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, tagihan lainnya dan Jasa perbankan lainnya.
- f) Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan Sertifikat Deposito untuk selanjutnya dilakukan penyetoran kepada petugas *Teller*.
- g) Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam (*black list*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan memperjelaskan perjanjian permohonan rehabilitasinya.
- h) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegunaan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- i) Bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
- j) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

10) *Penyelia Payment Point*

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyediakan uang Kas untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan.
- b) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- c) Mencatat semua transaksi yang terjadi dan pengumpulan bukti-bukti transaksinya.
- d) Membuat laporan keadaan uang kas dan laporan lain yang diperlukan.
- e) Mengusahakan dengan aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- f) Meneruskan transaksi nasabah dan calon nasabah ke cabang induk dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.

- g) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegunaan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- h) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- i) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

11) *Account Officer*

Mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a) Membantu penyelia pemasaran dan KKP dalam menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan serta mencari dan menyeleksi nasabah baru dan memelihara nasabah lama dalam hal penghimpunan dana maupun penggunaan dana.
- b) Memproses permohonan kredit.
- c) Monitoring Rekening Koran nasabah untuk mengetahui sejauh mana aktifitas keuangan nasabah dan pemanfaatan nasabah dan pemanfaatan jasa-jasa bank.

12) *Administrasi Kredit*

Merupakan petugas Bank yang bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran Administrasi Kredit, membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya, serta memprakarsai produk-produk baru kredit dan non kredit.

13) *Asisten Administrasi*

Petugas Bank yang bertugas membantu penyelia luar negeri dalam hal administrasi terhadap transaksi-transaksi ekspor-import dan usaha valuta asing, melaksanakan kegiatan dibidang kerjasama dengan luar negeri dan valuta asing serta memberikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia.

14) *Teller*

Merupakan petugas Bank yang langsung berhubungan dengan nasabah dalam hal pembayaran dan penyeteroran uang nasabah dan bukan nasabah, bertanggung jawab terhadap laporan keadaan uang kas dan menyediakan uang

kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan.

15) Staf Umum atau Sumber Daya Manusia

Petugas yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional kerumah tanggaan terutama mengenai personalia, logistik, sekretariat, pengemudi dan satpam di dalam menunjang kegiatan Bank sehari-hari.

16) *Customer Service*

Petugas yang membantu memberikan informasi kepada para nasabah tentang produk-produk dan fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Jatim.

5. Analisis Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang pada dasarnya sudah baik. Dimulai pada saat permohonan kredit debitur, berkas akan ditangani oleh bagian administrasi kredit yang mampu memberikan informasi kepada pemohon tentang fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemohon. Selanjutnya berkas akan di tangani oleh *Account Officer* , disinilah terjadi pemisahan tugas dan otorisasi yang kurang baik pada bagian *Account Officer*. Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang *Account Officer* memegang peran yang sangat dominan dalam hal pemberian kredit. Selain sebagai pihak yang melakukan kunjungan dan analisis atas calon debitur, *Account Officer* juga menjadi satu-satunya pihak yang merekomendasikan persetujuan atas penolakan kredit yang diajukan kepada Komite Kredit. Untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, maka sebaiknya peran *Account Officer* untuk menganalisis nasabah dibagi dengan Penyelia Pemasaran dan KKP yaitu dalam hal wawancara pendahuluan dengan calon debitur. Hal ini diperlukan agar Penyelia Pemasaran dan KKP juga dapat melakukan penilaian terhadap calon debitur. Hasil wawancara awal serta berkas debitur kemudian didisposisikan kepada *Account Officer*. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari Penyelia Pemasaran dan KKP, *Account Officer* melakukan kunjungan lokasi (*On the Spot*) untuk memastikan dalam artian apakah calon debitur mempunyai usaha yang memerlukan pembiayaan dari kredit, dan seberapa pentingkah calon debitur ini mengajukan usulan permohonan kredit.

Pada saat proses analisis kredit telah terdapat pemisahan tugas, dibuktikan dengan keputusan kredit dibuat atas dasar analisis yang telah dilakukan oleh bagian *Account Officer* yang tentunya telah ahli dalam melakukan analisis terhadap calon debitur. Data-data hasil analisis kredit yang dilakukan oleh *Account Officer*, yang meliputi laporan penilaian agunan, hasil wawancara, serta seluruh data-data dan informasi yang telah disampaikan oleh pemohon selanjutnya diberikan pada komite kredit. Laporan tersebut diuji kembali dalam Rapat Komite Kredit baik dari segi keakuratan, keabsahan, kewajaran dan kelengkapan atas data-data dan informasi tentang kondisi obyektif pemohon, komite kredit disini terdiri dari tiga sampai empat orang yang tentunya mampu menilai berhak tidaknya calon debitur menerima kredit. Keputusan dalam rapat Komite Kredit berada pada Pimpinan Cabang sesuai dengan batas-batas wewenang yang ada. Hasil keputusan Rapat Komite Kredit ini dalam setiap bulannya dilaporkan kepada Direksi bank dengan surat pengantar dari Pimpinan Cabang dengan mengirimkan daftar usulan pemohon yang telah dibuatkan rekapnya dan telah ditandatangani oleh bagian Analisis Kredit dan Penyelia Pemasaran dan KKP atau pejabat berwenang lainnya.

Dalam proses penarikan kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang, petugas bank yang melaksanakan proses penarikan kredit adalah bagian Administrasi Kredit yang berkoordinasi dengan bagian *teller*. Sedangkan pihak yang memberikan persetujuan dalam penarikan kredit adalah Pimpinan Cabang dan Penyelia Pemasaran dan KKP. Pemohon dapat melakukan proses penarikan kredit setelah semua kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan kredit. Formulir-formulir yang digunakan antara lain:

a) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK)

Merupakan surat yang dibuat oleh pihak bank dan disetujui oleh pihak bank, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang dan Penyelia Pemasaran dan KKP, maupun calon debitur yang memuat dan mengatur tentang struktur kredit (plafond, tingkat suku bunga dan jangka waktu kredit), jaminan atau agunan, tata cara atau mekanisme pembayaran kembali kredit serta sanksi-sanksi jika pihak calon debitur melakukan wan prestasi.

- b) Order ke notaris
Merupakan surat permohonan kepada notaris untuk membuat Akta Perjanjian Kredit berdasarkan isi dari SPPK.
- c) Akad kredit
Merupakan Akta Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atas persetujuan kedua belah pihak.
- d) Adpis perkreditan
Merupakan surat yang dibuat oleh pihak bank yang berisi keterangan ringkas mengenai identitas calon debitur, besarnya plafond kredit yang disetujui, mekanisme pembayaran angsuran, jaminan serta besarnya biaya-biaya lainnya (biaya administrasi kredit, biaya materai dan sebagainya). Setelah adpis perkreditan ini dikeluarkan maka pihak Administrasi Kredit dapat segera merealisasikan dana kredit ke rekening debitur.
- e) Kwitansi realisasi kredit
Merupakan kwitansi yang dibuat oleh Administrasi Kredit setelah merealisasikan dana kredit ke rekening debitur.
- f) Slip penyetoran
Slip ini digunakan debitur sebagai bukti pembayaran sejumlah angsuran beserta bunganya yang harus dibayar tiap bulan kedalam rekening yang bersangkutan. Slip ini diotorisasi oleh petugas teller dan dibuat rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk debitur, lembar kedua untuk teller dan lembar ketiga untuk Administrasi Kredit.
- g) Kartu Pinjaman
Merupakan kartu yang dibuat untuk masing-masing debitur yang berisi tentang data ringkas debitur, jangka waktu angsuran beserta nominal angsuran dan bunganya. Kartu ini digunakan oleh Administrasi Kredit untuk mempermudah dilakukannya pengendalian atas pembayaran kembali kredit oleh debitur sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar analisis tingkat kolektibilitas debitur.

Setelah debitur melakukan pencairan dana *Account Officer* akan melakukan pengecekan secara fisik atau inspeksi *On the Spot* ke tempat debitur untuk mengetahui kebenaran apakah fasilitas kredit yang disalurkan PT. Bank Jatim

Cabang Malang digunakan sebagaimana mestinya.

Proses *monitoring* atau pemantauan kredit dapat dilihat dari Dokumen kredit dan file kredit debitur pada PT. Bank Jatim Cabang Malang yang terpelihara dan tersimpan pada bagian Administrasi kredit, selain itu dalam proses monitoring dilakukan review secara rutin terhadap file-file kredit setiap tiga bulan dari sejak kredit dikucurkan. Sedangkan untuk pemantauan terhadap kewajiban pembayaran angsuran debitur dilakukan oleh *teller*, sebagai pengelola rekening nasabah. Petugas pengelola rekening (*teller*) aktif memberikan informasi kepada bagian Akuntansi yang akan disampaikan kepada *Account Officer* atas terjadinya pergerakan rekening debitur, baik diminta atau tidak, terutama apabila pergerakan rekening atas kredit yang diberikan diluar kewajaran. Langkah pemantauan file-file kredit ini memudahkan pihak PT. Bank Jatim Cabang Malang melakukan pengawasan dan apabila terjadi kredit macet, *Account Officer* akan merekomendasikan tindakan kompromi, kooperatif atau bahkan pelelangan dengan Direksi sebagai pemegang otorisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam sistem pemberian kredit yang ada pada PT Bank Jatim Cabang Malang telah baik Karena sistem pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Terutama mereka telah menerapkan prinsip 5C pada analisa kredit mereka. Dengan memasukkan berbagai aspek usaha, pemasaran, dan berbagai aspek penting lain yang menunjang analisa agar mampu memberi hasil analisa kredit yang akurat guna meminimalkan resiko kredit, selain itu sistem yang ada juga didukung oleh personel yang sangat berkopeten dan dapat dipercaya. Secara umum juga telah ada pemisahan tugas dan otorisasi yang cukup baik, meskipun masih harus dilakukan perbaikan karena terdapat praktek yang kurang tepat pada saat permohonan kredit, di mana *Account Officer* terlalu mendominasi. Sistem yang ada juga telah didukung dengan dokumen dan catatan yang memadai untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pada saat permohonan kredit sampai dengan proses monitoring. Kontrol fisik aktiva dan Catatan juga tidak lupa dilakukan, yaitu seperti kegiatan *On the spot* (kunjungan lokasi) pada saat proses permohonan dan setelah debitur melakukan pencairan kredit, selain itu pergerakan rekening debitur juga selalu dipantau oleh pihak bank. Sistem pemberian kredit

pada Bank Jatim Cabang Malang akan lebih baik lagi apabila juga ditambahkan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*), meskipun pemeriksaan secara rutin telah dilakukan oleh Auditor Intern, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, tetapi pemeriksaan itu hanya dilakukan setahun sekali. Karena itu *surprised Audit* yang dilaksanakan oleh Auditor Intern hendaknya dilakukan pada setiap bagian yang ada pada waktu yang berbeda. Peranan lain dari Auditor Intern adalah sebagai anggota Komite kredit yang memberikan pertimbangan atas keputusan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak setelah melakukan analisa data. Sebaiknya Auditor Intern juga melakukan kunjungan lokasi, sebagai bagian dari *surprised audit*, untuk memastikan bahwa Laporan Kunjungan Nasabah yang dibuat oleh *Account Officer* telah sesuai dengan kondisi calon debitur yang sesungguhnya.

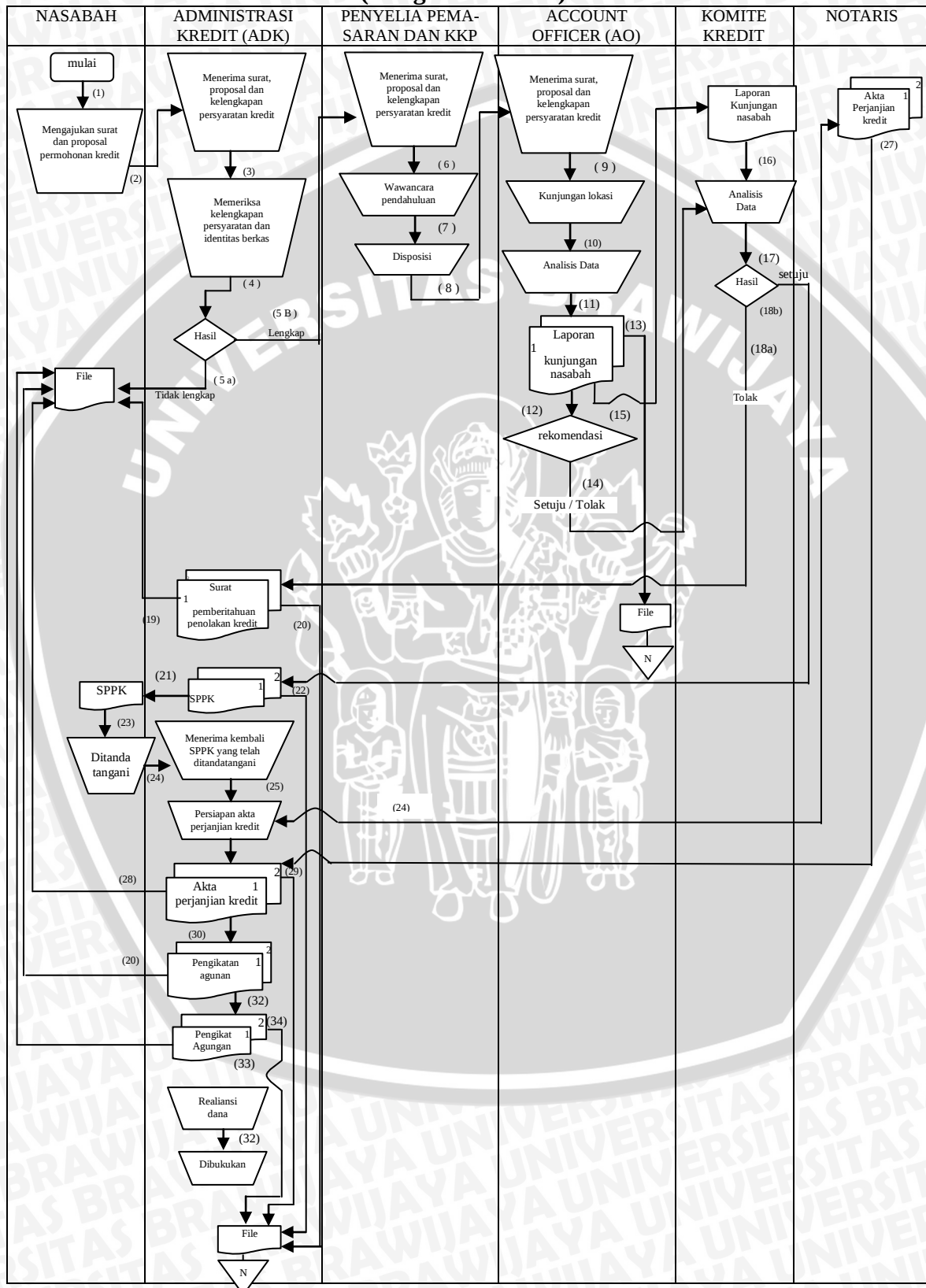
6. Pengawasan Kredit Bermasalah

Keberhasilan pemberian kredit bukan hanya didasarkan kepada sistem pemberian yang baik saja, tetapi juga pada pengawasan dan pengendalian kredit pasca kredit dikucurkan. Hal ini diperlukan sebab proses pembayaran angsuran tidak semuanya dalam keadaan lancar. Terkadang para nasabah mengalami penurunan usaha, meninggal atau sebab lain yang membuat pembayaran angsuran terhambat. Proses pengawasan pada PT. Bank Jatim Cabang Malang dilakukan melalui kunjungan langsung yang dilakukan dalam waktu bulanan, tahunan, juga dengan mengamati perkembangan kondisi nasabah melalui laporan pembayaran. Proses pengawasan langsung ditujukan untuk mengetahui penggunaan dana kredit agar terhindar dari penggunaan dana kredit yang tidak semestinya. Pengamatan melalui laporan keuangan untuk melihat ketepatan pembayaran para nasabah, jika diindikasikan akan terjadi masalah maka akan dilakukan pembinaan.

Dalam proses pembayaran kembali kreditnya, PT. Bank Jatim mengklasifikasikan debiturnya pada beberapa tingkat kolektibilitas. Tingkat kolektibilitas ini berdasarkan pada dua analisis yaitu:

1. Kolektibilitas 1 dikategorikan lancar, yaitu untuk debitur yang tidak pernah menunggak pembayarannya.
2. Kolektibilitas 2 dikategorikan dalam perhatian khusus, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayarannya selama satu sampai 90 hari.

Gambar 12
Sistem Pemberian Kredit
Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang
(Yang Disarankan)



3. Kolektibilitas 3 dikategorikan kurang lancar, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayaran selama 91 sampai 120 hari.
4. Kolektibilitas 4 dikategorikan diragukan, yaitu debitur yang menunggak pembayaran selama 121 sampai 180 hari.
5. Kolektibilitas 5 dikategorikan macet, yaitu untuk debitur yang menunggak pembayaran selama lebih dari 180 hari atau pun debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

Apabila terdapat konsumen yang mengalami permasalahan di dalam pembayaran angsuran maka bank akan melakukan proses pembinaan yang dilakukan oleh bagian AO. Proses pembinaan ini ditujukan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan agar tidak menjadi semakin parah. Langkah yang dilakukan adalah:

1. Restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran dari perjanjian semula restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:
 - a) Merubah besaran angsuran yang harus dibayar nasabah tiap bulan
 - b) Merubah jangka waktu pembayaran yang semula setiap bulan dirubah 2 bulan sekali atau yang lain.
 - c) Merubah bunga pinjaman
2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan apabila nasabah tidak dapat untuk dibina atau dicari jalan keluar permasalahan. Proses penyitaan akan dilakukan oleh KP2LN (Komisi Pengurusan Piutang Lelang Negara)

Prosedur pembinaan sampai dengan penyitaan melalui tahapan yang panjang, yaitu pembinaan nasabah mulai dari masuk kolektibilitas awal yaitu yang dikategorikan dalam perhatian khusus, jika tidak dapat ditemukan pemecahan maka kategori akan dinaikkan menjadi kurang lancar, pembinaan akan terus dilakukan sampai nasabah mencapai kategori macet. Pihak PT Bank Jatim Cabang Malang akan mengirim berkas penyitaan, penilaian agunan serta semua urusan penyitaan lain yang akan dilakukan KP2LN.

Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang terdapat dua jenis nasabah bermasalah yaitu:

- a) Nasabah bermasalah yang masih memiliki itikad baik untuk mengangsur tetapi kondisi usahanya sedang menurun. Biasanya akan dilakukan restrukturisasi dengan mengatur kembali angsuran yang disesuaikan dengan kondisi nasabah.
- b) Nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengangsur dan usahanya sedang kondisi usahanya sedang menurun. Bilamana terdapat nasabah yang seperti itu maka bagian AO sesegera mungkin melakukan pelimpahan berkas kepada KP2LN.

7. Analisis Pengawasan Kredit Bermasalah

Pengawasan dan pengendalian kredit pasca kredit dikururkan pada PT Bank Jatim Cabang Malang telah baik sebab pengawasan telah dilakukan semenjak kredit baru dikururkan yaitu mengawasi apakah penggunaan dana kredit sesuai dengan yang diajukan. Hal ini mencegah penggunaan dana yang tidak semestinya yang nantinya akan menyebabkan masalah. Pengendalian kredit bermasalah sangat baik dengan memberikan pembinaan melalui proses restrukturisasi secara bertahap yang diharapkan mampu meminimalkan kredit macet. Yang perlu ditambahkan disini adalah Bank Jatim Cabang Malang sebaiknya juga mengadakan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) terhadap debitur, jadi tidak hanya kunjungan rutin yang biasa dilakukan. Hal ini baik diterapkan, agar debitur terpacu untuk menjalankan usahanya sebaik mungkin dan kelancaran pembayaran kredit kembali oleh debitur juga lebih terjamin.

D. Efektifitas Penyaluran Kredit

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Semakin rendah LDR bank maka semakin likuid bank tersebut.

Rumus:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga.
2. Dana pihak ketiga meliputi Giro, Tabungan dan Deposito

Efektifitas penyaluran kredit dapat diukur dari besaran LDR, dimana pada PT. Bank Jatim Cabang Malang pencapaian angka LDR mulai dari 2006-2008 menunjukkan angka seperti dibawah ini:

Tabel 10
PERHITUNGAN LOAN TO DEPOSIT RATIO

dalam jutaan rupiah terkecuali persentase

PT Bank Jatim Cabang Malang	PERIODE		
	2006	2007	2008
A. Kredit yang diberikan			
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0	0	0
b. Pihak ketiga	313.317	368.767	443.884
I Jmlah Kredit yang diberikan	313.317	368.767	443.884
B. Dana Pihak ketiga			
1. Giro	343.766	202.562	201.388
2. Tabungan	158.616	211.251	287.818
3. Deposito	42.237	38.462	61.464
II Jumlah DPK	544.619	452.275	550.670
LDR (I/II) x 100%	57,53%	81,54%	80,61%
Perkembangan LDR		24,01%	-0,93%

sumber: data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan LDR pada tabel 10, nilai LDR PT.Bank Jatim Cabang Malang periode 2006-2008 yaitu sebesar 57,53% ditahun 2006; 81,54% ditahun 2007, dan pada tahun 2008 sebesar 80,61%. Dapat diketahui bahwa dari Tahun 2006 ke 2007 mengalami kenaikan sebesar 24,01% dan pada tahun 2008 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,93%. Pencapaian angka LDR PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat dikatakan baik karena dari tahun 2006-2008 tingkat LDR berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah yaitu maksimum sebesar 110%.

2. Non Performing Loans (NPL)

keberhasilan pemberian kredit biasanya ditinjau dari tingkat NPL (non Performing Loans). Batas ukur rasio NPL sesuai dengan ketentuan BI adalah 5% dan perhitungan NPL diambil berdasarkan tiga kolektibilitas terakhir yaitu kurang lancar, diragukan dan macet dengan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Yang diberikan dengan kolektibilitas 3 s/d 5}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan NPL pada PT.Bank Jatim Cabang Malang:

Tabel 11
PERHITUNGAN NON PERFORMING LOAN

dalam jutaan rupiah terkecuali persentase

PT Bank Jatim Cabang Malang	PERIODE		
	2006	2007	2008
A. Kredit yang bermasalah			
a. Kurang Lancar	0	212	200
b. Diragukan	71	74	509
c. Macet	48	853	951
I Jumlah Kredit yang bermasalah	119	1.139	1.660
A. Kredit yang diberikan			
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0	0	0
b. Pihak ketiga	313.317	368.767	443.884
I Jmlah Kredit yang diberikan	313.317	368.767	443.884
NPL (I/II) x 100 %	0,04%	0,31%	0,37%
Perkembangan NPL		0,27%	0,06%

sumber: data diolah

Angka NPL Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang tahun 2006 menunjukkan persentase sebesar 0,04% dengan kredit bermasalah sebesar 119 Juta, pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 0,27% dimana tingkat NPL-nya sebesar 0,31% dengan kredit bermasalah sebesar 1,139 milyar, serta pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari tahun 2007 sehingga tingkat NPL-nya adalah sebesar 0,37% dimana jumlah kredit bermasalah pada tahun 2008 adalah sebesar 1,66 milyar. Namun demikian, angka NPL masih jauh dibawah batas NPL yang ditetapkan BI yaitu sebesar 5%.

Penyumbang kredit bermasalah terbesar berasal dari KMK (Kredit Modal Kerja), untuk lebih jelasnya mengenai perincian tingkat kolektibilitas kredit berdasarkan penggunaan dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12
RINCIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PINJAMAN

BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN GABUNGAN - CABANG MALANG

dalam jutaan rupiah kecuali presentase

Tahun	Jenis Kredit	Tingkat Kolektibilitas					TOTAL
		1	2	3	4	5	
2006	MODAL KERJA AGROBISNIS	83	0	0	0	0	83
	MODAL KERJA LAINNYA	278.286	165	0	71	32	278.554
	INVESTASI PROPERTI	21	0	0	0	0	21
	INVESTASI LAINNYA	30.172	300	0	0	16	30.488
	KPR & KPA <=70	138	0	0	0	0	138
	Konsumsi lainnya	2.591	1.442	0	0	0	4.033
	TOTAL	311.291	1.907	0	71	48	313.317
2007	MODAL KERJA AGROBISNIS	163	0	0	0	0	163
	MODAL KERJA LAINNYA	333.914	2.194	0	74	813	336.995
	INVESTASI PROPERTI	4	0	0	0	0	4
	INVESTASI LAINNYA	25.079	14	212	0	40	25.345
	KPR & KPA <=70	93	0	0	0	0	93
	Konsumsi lainnya	6.167	0	0	0	0	6.167
	TOTAL	365.420	2.208	212	74	853	368.767
2008	MODAL KERJA AGROBISNIS	33	0	0	0	0	33
	MODAL KERJA LAINNYA	390.524	620	162	459	800	392.565
	INVESTASI PROPERTI	26.324	300	38	50	151	26.863
	INVESTASI LAINNYA	20	2	0	0	0	22
	KPR & KPA <=70	368	0	0	0	0	368
	Konsumsi lainnya	21.582	2.451	0	0	0	24.033
	TOTAL	438.851	3.373	200	509	951	443.884

Keterangan:

Kolektibilitas 1 : Lancar

Kolektibilitas 1 : Dalam Perhatian Kusus

Kolektibilitas 1 : Kurang Lancar

Kolektibilitas 4 : Diragukan

Kolektibilitas 5 : Macet

Sumber : PT. Bank Jatim Cabang Malang 2008

3. Analisis Efektifitas Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat dikatakan belum efektif hal ini terlihat dari pencapaian angka LDR yaitu sebesar 57,53% ditahun 2006; 81,54% ditahun 2007, dan pada tahun 2008 sebesar 80,61%. Dapat diketahui bahwa dari Tahun 2006 ke 2007 mengalami kenaikan sebesar 24,01% dan pada tahun 2008 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,93%. Meskipun pencapaian angka LDR PT. Bank Jatim Cabang Malang dapat dikatakan baik dan masih berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah yaitu maksimum sebesar 110%, tetapi di lain sisi LDR Bank Jatim cabang malang juga mengidentifikasikan adanya dana yang tidak produktif mengingat besarnya LDR suatu bank dikatakan sehat adalah $90\% < \text{LDR} < 94,75\%$. Artinya minimum LDR adalah 90% dan maksimum LDR adalah 94,75%, sedangkan nilai LDR PT. Bank Jatim Cabang malang berada jauh di bawah itu, dengan kata lain penyaluran kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang belum begitu efektif, karena seharusnya masih dapat dimaksimalkan lagi.

Jika diteliti lebih lanjut pada perkembangan pos-pos yang membentuk LDR yang terlihat pada tabel 13, pada tahun 2007 LDR mengalami peningkatan 24,01%. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa PT Bank Jatim Cabang Malang sebagai lembaga intermediasi antar kreditur dan debitur menjalankan fungsinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada pos kredit dari tahun 2006 ke 2007 mengalami peningkatan sebesar 17,70%. Disini nilai LDR mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah kredit yang disalurkan tidak diikuti oleh peningkatan pada pos dana pihak ketiga, melainkan penurunan sebesar 16,96%, oleh karena itu peningkatan nilai LDR yang terjadi cukup besar. Pada 2006 dan 2007 Bank Jatim Cabang Malang memiliki jumlah dana menganggur (tidak produktif) yang cukup banyak, mengingat nilai dana pihak ketiga masih berada jauh diatas jumlah kredit yang diberikan. Jika dilihat lagi bank Jatim masih dikatakan sangat likuid, terutama pada tahun 2006 tingkat LDR-nya sangat rendah, hal ini semakin menegaskan masih terdapat banyak dana yang seharusnya masih bisa dialokasikan dalam bentuk kredit. Jadi dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 manajemen Bank Jatim belum cukup efektif dalam mengalokasikan dananya untuk kredit, yaitu dilihat dari nilai LDR-nya

yang hanya sebesar 57,53% dan 81,54%. Penyaluran kredit pada bank Jatim Cabang Malang Masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga likuiditasnya pada tingkat LDR yang lebih tinggi tetapi masih berada dalam batas aman, dimana bank tersebut masih dapat dikatakan sehat dan likuid.

LDR tahun 2008 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,93%. Penurunan ini memang menunjukkan bahwa Bank Jatim Cabang Malang lebih likuid dari tahun sebelumnya, tetapi hal ini juga mengidentifikasikan dana yang tidak produktif bertambah lagi ditahun 2008. Penurunan LDR disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada jumlah kredit masih berada di bawah peningkatan yang terjadi pada DPK. Dari tahun 2007 ke 2008 jumlah kredit yang diberikan meningkat 20,37% atau sebesar 75 milyar, sedangkan DPK mengalami peningkatan sebesar 21,76% atau sebesar 98 milyar, karena itulah terjadi sedikit penurunan pada LDR. Pada 2007 dan 2008 tingkat likuiditas Bank Jatim Cabang Malang dapat dikatakan stabil, walaupun demikian manajemen bank belum secara efektif melakukan penyaluran kredit sehingga optimalisasi alokasi dana bank belum sepenuhnya tercapai. Bank Jatim Cabang Malang sebagai lembaga intermediasi seharusnya bisa lebih maksimal dalam menyalurkan kredit, melihat jumlah DPK yang mengalami peningkatan, sehingga seharusnya ada tindakan yang berimbang melalui kredit yang diberikan, dengan tetap menjaga tingkat likuiditas pada posisi yang sehat.

Tabel 13
PERKEMBANGAN LOAN TO DEPOSIT RATIO

dalam jutaan rupiah terkecuali persentase

PT Bank Jatim Cabang Malang	PERIODE		
	2006	2007	2008
I Jmlah Kredit yang diberikan	313.317	368.767	443.884
peningkatan (penurunan)		55.450	75.117
Persentase		17,70%	20,37%
II Jumlah DPK	544.619	452.275	550.670
peningkatan (penurunan)		-92.344	98.395
Persentase		-16,96%	21,76%
LDR (I/II) x 100 %	57,53%	81,54%	80,61 %
Perkembangan LDR		0,04%	-0,93%

sumber: data diolah

Perhitungan lain yang mengidentifikasi kredit yang disalurkan telah efektif adalah pencapaian angka NPL (*Non Performing Loans*) sebesar 0,04% pada tahun 2006 dengan kredit bermasalah sebesar 119 Juta, pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 0,27% dimana tingkat NPL-nya sebesar 0,31% dengan kredit bermasalah sebesar 1,139 milyar, serta pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari tahun 2007 sehingga tingkat NPL-nya adalah sebesar 0,37% dimana jumlah kredit bermasalah pada tahun 2008 sebesar 1,66 milyar. Namun demikian, angka NPL masih sangat jauh dibawah batas NPL yang ditetapkan BI yaitu sebesar 5%.

Peningkatan nilai NPL Bank Jatim Cabang Malang dari tahun 2006-2008 disebabkan oleh jumlah penyaluran kredit yang semakin meningkat diikuti pula oleh peningkatan jumlah kredit bermasalah. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah kredit bermasalah dari tahun-ketahun perlu diwaspadai dan perlu dilakukan evaluasi dari segi jenis kreditnya dan sistem pemberian serta pengawasan kredit yang ada pada bank Jatim Cabang Malang. Tetapi meskipun demikian nilai NPL Bank Jatim masih sangat baik, hal ini menandakan bahwa manajemen Bank Jatim Cabang Malang mampu dengan baik mengelola kredit yang diberikan, dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*Prudential Banking*), tetapi Bank Jatim Cabang Malang tetap memerlukan perbaikan agar lebih baik dan kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah dapat berubah menjadi menurun untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa, penyaluran kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang belum begitu efektif, dimana masih terdapat dana yang tidak produktif yang seharusnya masih bisa dimaksimalkan penggunaannya. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai LDR yang menunjukkan bank terlampaui likuid. Seharusnya Bank Jatim Cabang Malang lebih berani dalam meningkatkan volume kreditnya atau mengalokasikan dananya untuk kredit. Dimana, sumber likuiditas bank dapat dipelihara meskipun bank banyak menyalurkan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek, karena kredit jangka panjang maupun jangka pendek tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas apabila jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman direncanakan sebaik mungkin dan betul-betul disesuaikan dengan pendapatan masa mendatang dari debiturnya.

Didukung lagi dengan nilai NPL yang sangat rendah, bahkan belum menyentuh 1%, ini berarti sistem pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan bank jatim telah cukup mampu menekan timbulnya kredit bermasalah, hal ini semakin menegaskan agar PT. Bank Jatim Cabang Malang mengoptimalkan alokasi dananya dalam bentuk kredit.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data terkait dengan efektivitas penyaluran kredit dalam rangka mengoptimalkan alokasi dana bank yang diukur dari tingkat LDR dan NPL, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pencapaian nilai LDR PT. Bank Jatim Cabang Malang masih berada jauh di bawah batas LDR bank yang dinyatakan sehat, yaitu $90\% < \text{LDR} < 94,75\%$, yang artinya minimum LDR adalah 90% dan maksimum LDR adalah 94,75%. Sedangkan LDR Bank Jatim dari 2006-2008 tertinggi hanya mencapai angka 81%. Bank Jatim Cabang Malang dilihat dari tingkat LDR-nya dikatakan sangat likuid, namun disisi lain juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Bank Jatim memiliki jumlah dana tidak produktif yang cukup banyak, dimana jumlah dana yang dihimpun berada jauh di atas jumlah kredit yang disalurkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran kredit belum sepenuhnya tercapai, dan optimalisasi alokasi dana terutama untuk kredit belum secara optimal dilakukan oleh Bank Jatim.

Apabila dilihat dari NPL, efektivitas penyaluran kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang telah tercapai, dimana nilai NPL-nya berada di bawah 1%. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa hal yaitu:

1. Peningkatan alokasi dana untuk kredit dari tahun ke tahun ternyata diikuti oleh kecenderungan peningkatan jumlah kredit bermasalah serta peningkatan nilai NPL.
2. Sistem pemberian dan pengawasan kredit yang ada sebenarnya cukup mendukung terciptanya efektifitas penyaluran kredit. Namun pada sistem pemberian kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Malang *Account Officer* memegang peran yang sangat dominan. Selain sebagai pihak yang melakukan kunjungan analisis atas nasabah, *Account Officer* juga menjadi satu-satunya pihak yang merekomendasikan persetujuan atau penolakan kredit yang diajukan kepada komite kredit. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu Pengawasan yang dilakukan selama ini

dilakukan secara rutin, sehingga bagian yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu.

B. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan alokasi dana bank pada PT. Bank Jatim Cabang Malang, maka hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Banyaknya dana yang tidak produktif yang tercermin dari tingkat LDR pada PT. Bank Jatim Cabang Malang, menandakan efektifitas penyaluran kredit belum tercapai dan optimalisasi alokasi dana bank terutama untuk kredit belum maksimal dilakukan. Seharusnya Bank Jatim Cabang Malang lebih berani dalam meningkatkan volume kreditnya atau mengalokasikan dananya untuk kredit. Dimana, sumber likuiditas bank dapat dipelihara meskipun bank banyak menyalurkan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek, karena kredit jangka panjang maupun jangka pendek tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas apabila jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman direncanakan sebaik mungkin dan betul-betul disesuaikan dengan pendapatan masa mendatang dari debiturnya. Didukung lagi dengan nilai NPL yang sangat rendah, bahkan belum menyentuh 1%, ini berarti sistem pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan bank jatim telah cukup mampu menekan timbulnya kredit bermasalah, hal ini semakin menegaskan agar PT. Bank Jatim Cabang Malang mengoptimalkan alokasi dananya dalam bentuk kredit.
2. Adanya peningkatan pemberian kredit dari tahun ke tahun ternyata diikuti dengan kecenderungan peningkatan pada jumlah kredit bermasalah dan secara otomatis tingkat NPL juga ikut meningkat. Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank. Kecenderungan inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank, dimana diperlukan suatu tindakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak berlangsung terus-menerus. Restrukturisasi merupakan tindakan yang seharusnya benar-benar diterapkan oleh pihak bank apabila sebuah kredit teridentifikasi akan macet. Dalam hubungan dengan hal tersebut langkah yang diambil BI untuk membantu proses restrukturisasi

kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa : “Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi ke-wajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga;
- b. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d. perpanjangan jangka waktu kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit;
- f. pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.”

Dengan adanya ketentuan di atas PT. Bank Jatim Cabang Malang diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola kreditnya, sehingga efektifitas penyaluran kredit dapat tercapai.

3. Pada sistem pemberian kredit sebaiknya wawancara pendahuluan dilakukan oleh Penyelia Pemasaran dan KKP kemudian hasil wawancara tersebut didisposisikan kepada *Accout Officer* untuk dilakukan kunjungan ke lapangan. Peranan *Account Officer* dimulai sejak menerima disposisi dari Penyelia Pemasaran dan KKP. Setelah menerima disposisi kemudian *Accout Officer* melakukan kunjungan lokasi (*On the spot*) ke calon debitur.
4. Pada pelaksanaan sistem pemberian dan pengawasan kredit perlu ditambahkan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) baik untuk pihak bank sendiri dan pihak debitur. Sehingga kinerja seluruh pegawai khususnya bagian kredit dapat meningkat dan agar pihak debitur terpacu untuk menjalankan usahanya sebaik mungkin sehingga kelancaran pembayaran kredit kembali oleh debitur juga lebih terjamin. Perbaikan sistem pemberian dan pengawasan ini diperlukan untuk menunjang efektifitas penyaluran kredit sehingga optimalisasi alokasi dana untuk kredit semakin meningkat dengan jumlah kredit bermasalah yang relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal. 2003. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perbankan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, Thomas, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudirman, I Wayan. 2000. *Manajemen Perbankan Suatu Aplikasi Dasar*. Denpasar: PT. BP.
- Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Riyadi, Slamet. 2004. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tawaf, Tjukria.P. 1999. *Audit Intern Bank Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, & Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- <http://www.bi.go.id>. Situs Resmi Ba

Dalam Jutaan Rupiah

AKTIVA	2008	2007	2006
Kas	97.777,00	100.089,00	95.266,00
Giro pada Bank Indonesia	0,00	0,00	0,00
Giro pada Bank lain	5,00	0,00	58,00
Penyisihan penghapusan giro -/-			
Bersih	5,00	0,00	58,00
penempatan pada bank lain	0,00	0,00	0,00
Penyisihan penghapusan penempatan -/-	0,00	0,00	1.501,00
Bersih	0,00	0,00	-1.501,00
Efek-efek			
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa			
Diperdagangkan	0,00	0,00	0,00
Tersedia untuk dijual	0,00	0,00	0,00
Dimiliki hingga jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
b. Pihak ketiga			
Dimiliki hingga jatuh tempo	0,00	127.500,00	100.000,00
Penyisihan penghapusan efek-efek -/-	0,00	0,00	645,00
Bersih	0,00	127.500,00	99.355,00
Kredit yang diberikan			
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,00	0,00	0,00
b. Pihak ketiga	443.884,00	368.767,00	313.317,00
Penyisihan penghapusan kredit -/-	7.086,00	6.127,00	4.609,00
Bersih	436.798,00	362.640,00	308.708,00
Aktiva pajak tangguhan			
Penyertaan			
Metode biaya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan penghapusan penyertaan -/-	0,00	0,00	0,00
Bersih	0,00	0,00	0,00
Aktiva tetap			
Harga perolehan	6.713,00	5.667,00	5.613,00
Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-	4.489,00	4.214,00	3.919,00
Nilai buku	2.224,00	1.453,00	1.694,00
Aktiva lain-lain	160.839,00	131.483,00	348.642,00
Penyisihan Restrukturisasi Kredit -/-	4,00	16,00	17,00
Bersih	160.835,00	131.467,00	348.625,00
JUMLAH AKTIVA	697.639,00	723.149,00	852.205,00



BANK JATIM
Aman Terpercaya

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

NERACA GABUNGAN : 04 - CABANG MALANG

Per : 31 Desember

Dalam Jutaan Rupiah

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2008	2007	2006
<u>Kewajiban :</u>	-		
Kewajiban segera lainnya	3.938,00	7.015,00	9.607,00
Simpanan nasabah			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	75.137,00	197.119,00	241.291,00
Pihak ketiga	550.670,00	452.275,00	544.619,00
Jumlah Simpanan	625.807,00	649.394,00	785.910,00
Simpanan dari bank lain			
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	0,00	0,00	0,00
Pihak ketiga	509,00	1.190,00	1.030,00
Jumlah simpanan dari bank lain	509,00	1.190,00	1.030,00
Surat berharga yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00
Pinjaman yang diterima	171,00	72,00	90,00
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	589,00	585,00	154,00
Kewajiban lain-lain	13.092,00	10.227,00	2.342,00
Jumlah Kewajiban	644.106,00	668.483,00	799.133,00
<u>Ekuitas:</u>			
Modal saham - nilai nominal Rp.1 per saham:			
Modal dasar 500.000 saham seri A dan 250.000 saham seri B pada tahun 2002 dan 153.000 saham seri A dan 147.000 saham seri B pada tahun 2001 dan 2002	0,00	0,00	0,00
Modal ditempatkan dan disetor penuh- 243.747 saham pada tahun 2002, 215.601 saham pada tahun 2001 dan 166.644 saham pada tahun 2000			
Cadangan	0,00	0,00	0,00
Saldo Laba	53.533,00	54.666,00	53.072,00
Jumlah Ekuitas	53.533,00	54.666,00	53.072,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	697.639,00	723.149,00	852.205,00